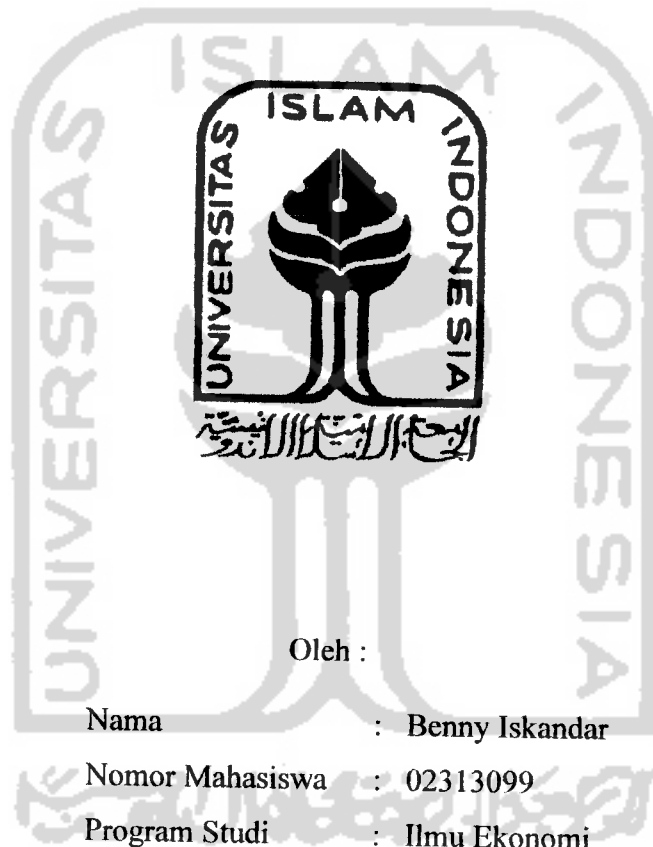


Efisiensi Kebijakan Fiskal Daerah di Propinsi Riau :

Studi Kasus Riau Daratan Periode 2003-2004

SKRIPSI



Oleh :

Nama : Benny Iskandar

Nomor Mahasiswa : 02313099

Program Studi : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA
2007**

Efisiensi Kebijakan Fiskal Daerah di Propinsi Riau :

Studi Kasus Riau Daratan Periode 2003 – 2004

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir

guna memperoleh gelar Sarjana jenjang strata 1

Program Studi Ilmu Ekonomi

Pada Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia



Oleh :

Nama : Benny Iskandar

Nomor Mahasiswa : 02313099

Program Studi : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA
2007**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain seperti dimaksud dalam buku pedoman penyusunan skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi FE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka Saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 13 Maret 2007

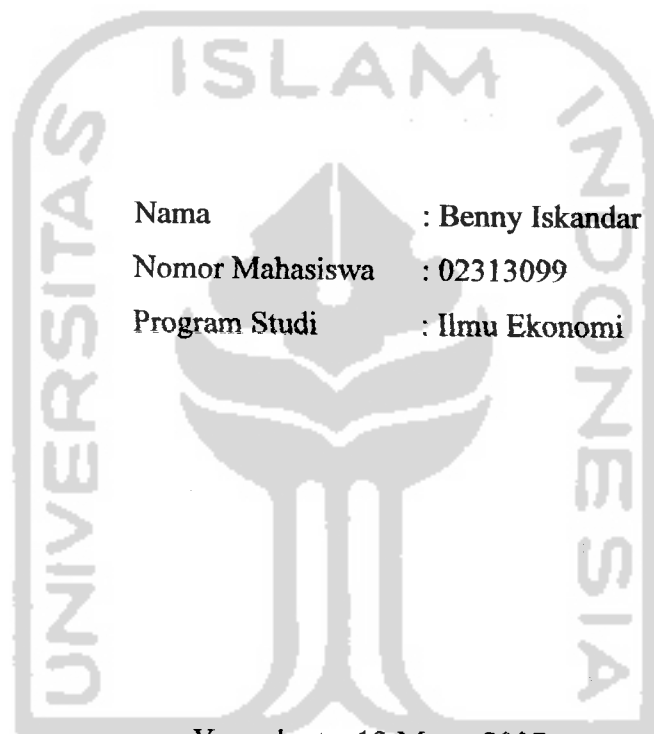
Penulis,

Benny Iskandar

PENGESAHAN

Efisiensi Kebijakan Fiskal Daerah di Propinsi Riau :

Studi Kasus Riau Daratan Periode 2003 – 2004



Nama : Benny Iskandar

Nomor Mahasiswa : 02313099

Program Studi : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 13 Maret 2007

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sarastri Mumpuni R', written over a faint watermark of the UII logo.

Dra. Sarastri Mumpuni R, M.Si.

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

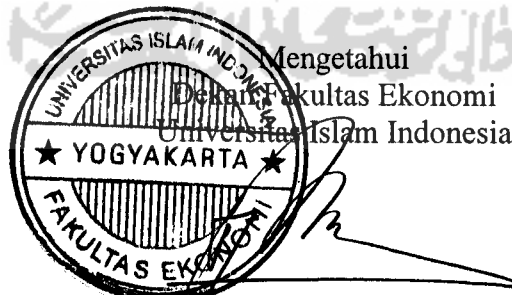
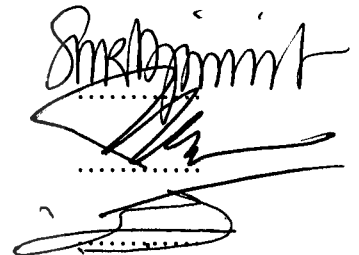
SKRIPSI BERJUDUL

**Efisiensi Kebijakan Fiskal Daerah di Propinsi Riau: Studi Kasus Riau Daratan
Periode 2003 - 2004**

**Disusun Oleh: BENNY ISKANDAR
Nomor mahasiswa: 02313099**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**
Pada tanggal : 13 April 2007

Penguji/Pembimbing Skripsi : Dra. Sarasri Mumpuni R, M.Si
Penguji I : Drs. Jaka Sriyana, M.Si, Ph.D
Penguji II : Drs. Priyonggo Suseno, M.Sc



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia
Drs. Asmai Ishak, M.Bus, Ph.D

Halaman Motto

"Kesenangan dunia hanyalah sedikit sekali dibandingkan dengan kesenangan akhirat yang jauh lebih baik, bagi mereka yang bertaqwa dan kamu tidak akan teraniaya sedikit pun".
(QS An Nisaa :77)

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan) kerjakanlah Dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap"
(Q.S. Asy Syarh : 6-8)

"Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk"
(Q.S. Al-Baqarah : 45)

"Ilmu adalah senjata, Sabar adalah pakaian, Yakin adalah penolong, Taat adalah kecintaan, Sholat adalah Kebahagiaanku"
(Suri Tauladan Rasulullah)

Halaman Persembahan



*"Segala sesuatu yang aku kerjakan di dunia ini seutuhnya
Ku persembahkan kepada-Mu.....
Yaa Rabbul 'alamiin"*

*"Melalui Ayahanda dan Ibunda.....Kau selalu iringi
Setiap langkahku dengan do'a"*

*"Melalui Adik - Adikku.... Kau berikan kepadaku
Makna indahny kehidupan bersama
Canda, Tawa, dan Tangismu"*

*"Melalui Kekasihku.... Kau cerahkan hari-hariku
Dengan kasih sayang dan ketulusan cintamu
Semoga kan Abadi....."*

*"Mereka adalah anugerah dan cinta terindah
Dari-Mu, Allahu Yaa Karim...."*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efisiensi Kebijakan Fiskal Daerah di Propinsi Riau : Studi Kasus Riau Daratan Periode 2003 – 2004” yang merupakan suatu prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Shalawat serta Salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada semua orang yang mengikuti ajarannya hingga hari akhir.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapat banyak bantuan baik bersifat moril, materiil, dorongan, serta motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih khususnya kepada :

1. Ibu Sarastri Mumpuni R,Dra.,M.Si. selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dengan sabar serta memberikan arahan, motivasi dan dorongan dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak dan ibu Dosen di jurusan Ilmu Ekonomi yang telah memberikan masukan berupa ide, kritik, saran, dan dorongan dalam penulisan skripsi ini.
3. Seluruh staf dan karyawan khususnya karyawan perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
4. Seluruh staf dan karyawan Biro Pusat Statistik D.I. Yogyakarta dan karyawan Biro Pusat Statistik Riau yang telah membantu dalam pengumpulan data-data yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu yang telah memberikan kasih sayang, doa, dorongan, perhatian, kritik baik bersifat moral maupun materiil sehingga penulis dapat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, aku sayang kalian.
6. Adek-adekku : Risa dan Risky thank's ya atas dukungannya selama ini, abang sayang kalian semua.
7. Keluarga besar Ayahanda dan Ibunda, makasih atas kasih sayang dan doanya selama ini serta kesabarannya dalam menghadapi sifat dan sikapku.
8. Keluarga besar Bapak Ribtono : Mamak, Bang Kur, Kak Winda, Kak Deni, Lela, July, Ali dan Putri makasih ya atas perhatian dan dukungannya selama ini, aku sayang kalian semua.
9. Lela yang telah banyak membantu penulis baik berupa doa, dorongan, kasih sayang, kesabaran, nasehat dan pengertiannya selama ini, **aku sayang banget ma kamu ☺**.
10. Sahabat-sahabatku, Mbak Reva, Adam, Atta, Puy, Asep, Leny, Supra, Yulia, Falah, Rudy, Eko, Andre, Olan, Hafied, Romi, Dedy, Miko, aji Toni, Zaky, Sari, V3, Roly dan seluruh anak-anak IESP UII angkatan '02 makasih atas dukungan dan kebersamaannya selama ini, tetap kompak selalu....*cay yo...!!!*
11. Temen-temen kost GPA blok D2 : Mbak Merlin, Vivi, Herlin, Yona, Rika, Nuri, Nani, Ve, Anry, Jumi, Mesri, Lina makasih yach udah mau menampung dan menerima kedatanganku dengan senyuman indah kalian dikost (tetap rukun dan damai selalu yach....*peace...*)
12. Temen-temen KKN SL 87 : Rizal, Ahmad, Maul, Inuk, Riza, Yati, Dian, Elma, n' Tari, makasih ya atas kekompakan n' kerjasamanya selama di Siping, jangan lupakan kenangan itu semua...!!!
13. Temen-temenku anak alumni SMU Negeri 5 Pekanbaru yang ada di Jogja, Semarang, Bandung, Jakarta maupun di Pekanbaru, kapan kita kumpul lagi???. Ku merindukan kegilaan kalian semua!!!!

14. Tommy, Rivie & Desti, jangan pantang menyerah ya dalam menimba ilmu di Jogja, semoga apa yang kalian cita-citakan selama ini kan menjadi kenyataan.....Amin....
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

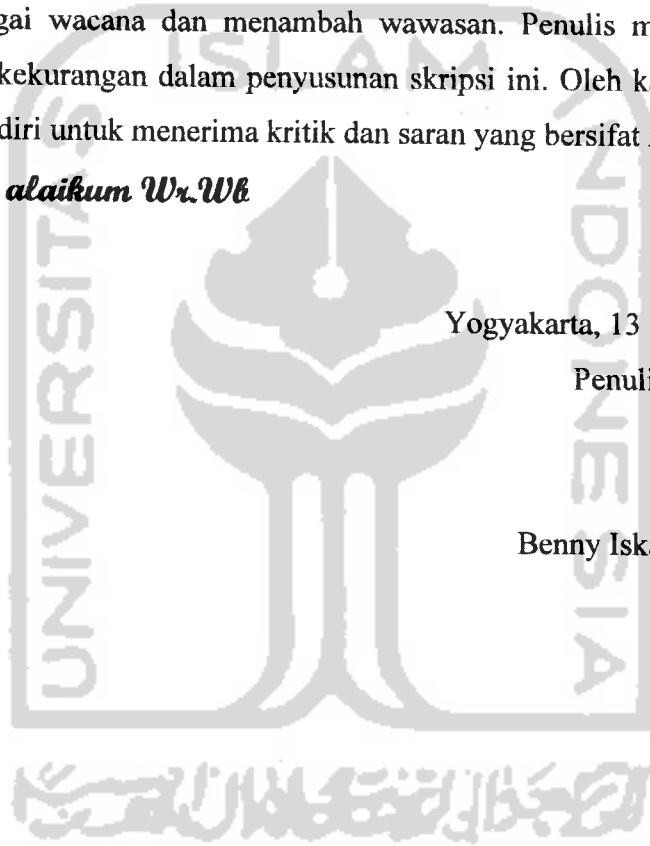
Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca sebagai wacana dan menambah wawasan. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis tidak menutup diri untuk menerima kritik dan saran yang bersifat membangun.

Wassalamu' alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 13 Maret 2007

Penulis

Benny Iskandar



DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	ii
Halaman Pengesahan Skripsi.....	iii
Halaman Pengesahan Ujian	iv
Halaman Kata Pengantar	v
Halaman Daftar Isi.....	viii
Halaman Daftar Tabel	xii
Halaman Daftar Gambar	xv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
Halaman Abstraksi	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.3.1. Tujuan Penelitian	8
1.3.2. Manfaat Penelitian	8
1.4. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN UMUM SUBYEK PENELITIAN	11
2.1. Keadaan Geografis di Propinsi Riau	11
2.2. Penduduk di Propinsi Riau.....	13

2.3. Pemerintahan Daerah Propinsi Riau.....	15
2.4. Perekonomian Propinsi Riau.....	16
2.4.1. Pendapatan Regional	16
2.4.1.1. Produk Domestik Regional Bruto.....	16
2.4.1.2. Pendapatan Regional Per Kapita.....	18
2.4.2. Penerimaan Daerah.....	19
2.4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	19
2.4.2.1.1. Pajak Daerah	19
2.4.2.1.2. Retribusi Daerah	21
2.4.2.2. Dana Perimbangan.....	23
2.4.2.2.1. Dana Alokasi Umum (DAU).....	23
2.4.3. Belanja Daerah	25
2.4.3.1. Belanja Rutin/Belanja Aparatur Daerah.....	25
2.4.3.2. Belanja Pelayanan Publik.....	27
2.4.3.2.1. Belanja Modal/Pembangunan.....	27
BAB III KAJIAN PUSTAKA.....	30
BAB IV LANDASAN TEORI	42
4.1. Teori Kebijakan Fiskal.....	42
4.1.1. Desentralisasi Sebagai Suatu Konsep.....	42
4.1.2. Kebijakan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah ..	44
4.1.3. Derajat Otonomi Fiskal Daerah	44
4.1.4. Kebijakan Keuangan Daerah	45
4.1.4.1. Penerimaan Daerah.....	45

4.1.4.2. Pengeluaran Daerah.....	46
4.2. Hubungan Antar Variabel	48
4.3. Efisiensi	49
4.3.1. Pengertian Efisiensi.....	49
4.3.2. Efisiensi Pengeluaran Pemerintah Daerah	50
BAB V METODE PENELITIAN	53
5.1. Lokasi Penelitian	53
5.2. Jenis dan Sumber Data.....	53
5.3. Definisi Variabel.....	54
5.4. Hubungan Antar Variabel	56
5.5. Metode Analisis Data	56
5.5.1. Konsep Dasar <i>Data Envelopment Analysis</i> (DEA)	57
5.5.2. Formulasi DEA	58
5.5.3. Nilai Manajerial DEA.....	60
5.5.4. Keterbatasan DEA.....	61
BAB VI ANALISIS DAN PEMBAHASAN	63
6.1. Deskripsi Data	63
6.2. Analisa Data	65
6.2.1. Tingkat Efisiensi.....	66
6.2.2. Sumber Inefisiensi dan Cara Mengatasinya.....	68
6.2.2.1. Sumber Inefisiensi.....	69
6.2.2.2. Mengatasi Inefisiensi dengan Angka Pengganda (<i>Multiplier</i>).....	70

6.2.2.3. Mengatasi Inefisiensi dengan Meminimumkan Input	76
6.2.2.4. Mengatasi Inefisiensi dengan Memaksimumkan Output.....	81
BAB VII KESIMPULAN DAN IMPLIKASI	85
7.1. Kesimpulan	85
7.2. Implikasi.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN.....	91



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Propinsi Riau 2003 – 2004 (Milyar Rupiah).....	2
1.2. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Propinsi Riau 2003 – 2004 (Milyar Rupiah).....	4
2.1. Banyaknya Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Riau Daratan (Hasil Sensus Penduduk 2000)	14
2.2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 1993 menurut Lapangan Usaha Tanpa Migas 2000 – 2003 (Juta Rupiah)..	17
2.3. PDRB dan Pendapatan Regional per Kapita Termasuk Migas 1999 – 2003 (Rupiah).....	18
2.4. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Riau Daratan (Milyar Rupiah)	20
2.5. Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota di Riau Daratan (Milyar Rupiah).....	22
2.6. Realisasi Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten/Kota di Riau Daratan (Milyar Rupiah)	24
2.7. Realisasi Pengeluaran Belanja Rutin Kabupaten/Kota di Riau Daratan (Milyar Rupiah).....	26

3.8. Realisasi Penggunaan Belanja Modal Kabupaten/Kota	
di Riau Daratan (Milyar Rupiah).....	28
3.1. Jenis input dan output yang digunakan dalam model penelitian.....	36
6.1. Tingkat Efisiensi Kebijakan Fiskal Daerah Kabupaten/Kota di Riau	
Daratan Tahun 2003-2004	66
6.2. Sumber Inefisiensi Dominan* pada Kebijakan Fiskal Daerah	
Kabupaten/Kota di Riau Daratan.....	69
6.3. Efisiensi, Acuan Efisiensi dan Angka Pengganda Pada 11	
Kabupaten/Kota di Riau Daratan.....	71
6.4. Rincian Perhitungan Efisiensi Input dengan Acuan Efisiensi dan	
Angka Pengganda Pada Kabupaten/Kota di Riau Daratan	
Tahun 2003 (Milyar Rupiah)	72
6.5. Rincian Perhitungan Efisiensi Output dengan Acuan Efisiensi dan	
Angka Pengganda Pada Kabupaten/Kota di Riau Daratan	
Tahun 2003 (Milyar Rupiah)	73
6.6. Rincian Perhitungan Efisiensi Input dengan Acuan Efisiensi dan	
Angka Pengganda Pada Kabupaten/Kota di Riau Daratan	
Tahun 2004 (Milyar Rupiah).....	74
6.7. Rincian Perhitungan Efisiensi Output dengan Acuan Efisiensi dan	
Angka Pengganda Pada Kabupaten/Kota di Riau Daratan	
Tahun 2004 (Milyar Rupiah)	75
6.8. Aktual, Target dan Efisiensi yang Dicapai Dengan Meminimumkan	
Input di Kabupaten/Kota Riau Daratan 2003	77

6.9. Aktual, Target dan Efisiensi yang Dicapai Dengan Meminimumkan	
Input di Kabupaten/Kota Riau Daratan 2004	79
6.10. Aktual, Target dan Efisiensi yang Dicapai Dengan Memaksimumkan	
Output di Kabupaten/Kota Riau Daratan 2003	82
6.11. Aktual, Target dan Efisiensi yang Dicapai Dengan Memaksimumkan	
Output di Kabuapten/Kota Riau Daratan 2004	83



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1. Kerangka Hubungan Keuangan Pusat - Daerah	5



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

- I. **Data Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Rutin, Belanja Modal, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2003 – 2004**
- II. **Tabel Efisiensi Tahun 2003**
- III. **Tabel Peer dengan Meminimumkan Input Tahun 2003**
- IV. **Tabel Target dengan Meminimumkan Input Tahun 2003**
- V. **Tabel Efisiensi Tahun 2004**
- VI. **Tabel Peer dengan Meminimumkan Input Tahun 2004**
- VII. **Tabel Target dengan Meminimumkan Input Tahun 2004**
- VIII. **Tabel Peer dengan Memaksimumkan Output Tahun 2003**
- IX. **Tabel Target dengan Memaksimumkan Output Tahun 2003**
- X. **Tabel Peer dengan Memaksimumkan Output Tahun 2004**
- XI. **Tabel Target dengan Memaksimumkan Output Tahun 2004**

ABSTRAKSI

Diberlakukannya Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membawa angin segar bagi pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam berbagai bidang yang diharapkan akan mampu meningkatkan efisiensi fiskal daerah. Meningkatnya efisiensi sebagai dampak positif dari desentralisasi fiskal didasarkan pada asumsi bahwa pemerintah daerah dianggap lebih tahu akan kebutuhan dan kondisi daerahnya sendiri dibandingkan dengan pemerintahan pusat sehingga diharapkan setiap Rupiah yang dibelanjakan lebih mengena sasaran dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing.

Penganggaran di daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal selama ini kurang berorientasi pada pencapaian kinerja yaitu pencapaian sasaran pembangunan. Terlebih ketidaksiapan kelembagaan di pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah semakin menjauhkan pencapaian-pencapaian yang seharusnya bisa dicapai melalui otonomi daerah dengan masih maraknya praktek-praktek korupsi.

Berdasarkan hal tersebut perlu dikembangkan pengukuran efisiensi daerah dalam mengelola keuangannya yang dikaitkan dengan pencapaian sasaran pembangunan. Penelitian ini berjudul "Efisiensi Kebijakan Fiskal Daerah di Propinsi Riau : Studi Kasus Riau Daratan Periode 2003 – 2004", diharapkan dapat sebagai acuan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pemerintah di masing-masing daerah.

Pengukuran efisiensi kebijakan fiskal daerah di propinsi Riau : studi kasus Riau daratan menggunakan alat analisis *Data Envelopment Analysis* (DEA) yang mengukur tingkat efisiensi relatif serta mengatasi inefisiensi yang terjadi di setiap Unit Kegiatan Ekonomi (UKE). Tingkat efisiensi yang dicapai oleh Kabupaten/Kota di Riau Daratan selama dua periode pengamatan (2003 dan 2004) sangat berfluktuasi. Hanya Kabupaten Siak (tahun 2003) dan Kota Pekanbaru (2003 & 2004) yang mencapai efisiensi sempurna 100%. Kabupaten yang mengalami penurunan efisiensi adalah Kabupaten Siak pada tahun 2004, hal ini dikarenakan turunnya penerimaan daerah yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Penurunan ini disebabkan oleh penyelewengan hasil pendapatan dari kedua komponen tersebut, terlebih dari retribusi daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu aspek reformasi yang mendapat perhatian hingga kini adalah persoalan kebijakan otonomi daerah. Pemerintah melalui kebijakan desentralisasi (politik dan fiskal) dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah telah membawa perubahan yang cukup berarti terhadap hubungan pusat-daerah. Diharapkan melalui kebijakan yang sudah berjalan dua tahun lebih itu dapat menyuburkan proses reformasi pada tingkat lokal dan memberi ruang gerak pada bidang politik, pengelolaan keuangan daerah dan pemanfaatan sumber-sumber daya daerah untuk kepentingan masyarakat lokal, sehingga tercipta corak pembangunan baru di daerah (Salamm,2005).

Implikasi langsung fungsi yang diserahkan kepada daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah kebutuhan dana yang cukup besar. Untuk membiayai tugas yang menjadi tanggung jawabnya tersebut, kepada daerah diberikan sumber-sumber pembiayaan, baik melalui pemberian kewenangan dalam pemungutan pajak/retribusi, sistem transfer, dan pemberian kewenangan untuk melakukan pinjaman. Sistem pembiayaan tersebut merupakan langkah maju bila dibandingkan dengan pengaturan-pengaturan yang selama ini berlaku. Peranan pemerintah dapat dikaji dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD). APBD merupakan instrumen kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah untuk menentukan arah dan tujuan pembangunan. Instrumen ini diharapkan berfungsi sebagai salah satu komponen pemicu tumbuhnya perekonomian daerah. Pemahaman akan betapa pentingnya peran anggaran sebagai salah satu instrumen kebijakan yang berfungsi memacu perekonomian suatu daerah harus berhadapan dengan kondisi di lapangan yang tidak dapat menjamin berjalannya fungsi tersebut dengan baik. Besar kecilnya pengeluaran pembangunan yang dianggarkan oleh pemerintah daerah akan menentukan besarnya pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu daerah (Haris, 2005)

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan
Pemerintah Daerah Propinsi Riau
2003 – 2004 (Milyar Rupiah)

Rincian	2003	2004 ^{*)}	Perubahan (%)
A. PENDAPATAN DAERAH	5.364,82	5.342,57	-0,41
1. Pendapatan Asli Daerah	292,35	282,84	-3,25
1.1. Pajak Daerah	79,11	66,87	-15,47
1.2. Retribusi Daerah	73,58	73,29	-0,39
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	40,16	40,56	0,99
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	99,48	102,11	2,64
2. Dana Perimbangan	4.704,22	4.881,62	3,77
2.1. Bagi Hasil Pajak	497,38	545,47	9,66
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	2.678,38	2.715,93	1,40
2.3. Dana Alokasi Umum	1.385,78	1.549,97	11,84
2.4. Dana Alokasi Khusus	142,67	70,24	-50,76
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	368,24	178,10	-51,63
B. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	1.342,61	990,57	-26,22
JUMLAH	6.707,44	6.333,14	-5,58

Sumber: BPS, Statistik Keuangan Pemda Propinsi Riau

^{*)} Data APBD

Tabel 1.1 menunjukkan, secara absolut total realisasi penerimaan Pemerintahan Daerah Propinsi Riau mengalami penurunan. Pada tahun 2003 realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Propinsi Riau Rp. 5.364,82 milyar dan pada tahun 2004 Rp. 5.342,57 milyar atau mengalami penurunan sebesar 0,41 %. Hal yang serupa terjadi pada komponen pendapatan asli daerah, yaitu Rp. 292,35 milyar pada tahun 2003 menjadi Rp. 282,84 milyar pada tahun 2004 atau turun sebesar 3,25 %. Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, terlihat bahwa pada dana perimbangan mengalami peningkatan yang tidak begitu besar, yaitu 3,77 %. Sedangkan pada komponen Lain-lain pendapatan yang sah mengalami penurunan pada tahun 2003 sebesar Rp. 368,24 milyar menjadi Rp.178,10 milyar pada tahun 2004 atau turun 51,63 %. Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari dana cadangan, penerimaan pinjaman dan obligasi, dan hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, mengalami penurunan dari Rp. 1.342,61 milyar pada tahun 2003 menjadi Rp. 990,57 milyar, atau turun 26,22 %.

Tabel 1.2
Realisasi Pengeluaran
Pemerintah Daerah Propinsi Riau
2003 – 2004 (Milyar Rupiah)

Rincian	2003	2004 ^{*)}	Perubahan (%)
A. BELANJA APARATUR DAERAH	2.005,82	2.120,30	5,70
1. Belanja Pegawai	688,65	976,43	41,78
2. Belanja Barang dan Jasa	211,21	370,35	75,34
3. Belanja Perjalanan Dinas	46,95	93,04	98,16
4. Biaya Pemeliharaan	42,48	72,74	71,23
5. Belanja Lain-lain	510,24	188,27	-63,10
6. Belanja Modal	506,26	419,45	-17,14
B. BELANJA PELAYANAN PUBLIK	3.789,92	3.947,55	4,15
1. Belanja Pegawai	401,79	587,49	46,21
2. Belanja Barang dan Jasa	267,40	448,82	67,84
3. Belanja Perjalanan Dinas	37,59	33,93	-9,73
4. Biaya Pemeliharaan	56,80	135,19	138,01
5. Belanja Lain-lain	-	22,40	-
6. Belanja Modal	2.711,30	2.281,78	-15,84
7. Bagi Hasil & Bantuan Keuangan	287,34	396,75	38,07
8. Pengeluaran Tidak Tersangka	27,66	41,18	48,87
C. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	911,70	265,29	-70,90
JUMLAH	6.707,44	6.333,14	-5,58

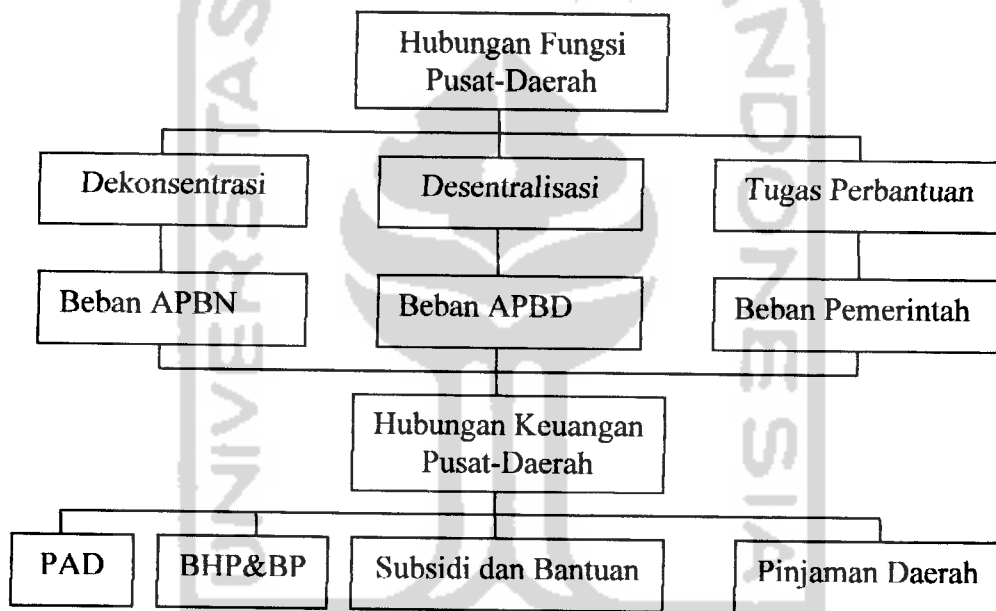
Sumber: BPS, Statistik Keuangan Pemda Propinsi Riau

^{*)} Data APBD

Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Propinsi Riau pada Tabel. 1.2 menunjukkan bahwa adanya peningkatan dan juga penurunan pengeluaran. Hal ini dapat terlihat dari belanja aparatur daerah yang merupakan bagian belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/pembangunan yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik) yang mengalami peningkatan dari Rp. 2.005,82 milyar pada tahun 2003 menjadi Rp. 2.120,30 milyar pada tahun 2004, atau naik sebesar

5,70%. Belanja Pelayanan Publik merupakan bagian belanja administrasi umum yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik), yang mengalami kenaikan dari Rp. 3.789,92 milyar pada tahun 2003 menjadi Rp. 3.947,55 milyar pada tahun 2004 atau mengalami kenaikan sebesar 4,15 %.

Gambar 1.1
Kerangka Hubungan Keuangan Pusat – Daerah



Sumber: Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, Jaka Sriyana.

Desentralisasi pada dasarnya adalah penataan mekanisme pengelolaan kebijakan dengan kewenangan yang lebih besar diberikan kepada daerah agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan lebih efektif dan efisien (Kartasmita, 1996 : 342). Pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui kebutuhan dan kondisi daerahnya, keinginan masyarakat di daerah masing-masing dibandingkan pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat merealisasikan pendapatan yang mereka punya dengan membelanjakan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing.

Otonomi daerah mendorong daerah mengoptimalkan kapasitas fiskalnya. Tujuan utamanya adalah pembiayaan pembangunan daerah. Seringkali upaya optimalisasi penerimaan ini tidak diimbangi dengan pertimbangan-pertimbangan lebih lanjut. Misalnya, pengaruh penambahan suatu jenis pajak dan retribusi baru terhadap sektor riil. Artinya, diperlukan sensitivitas yang tinggi dari pemerintah daerah dalam semua upaya mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Sebayang, 2005:203).

Namun, otonomi daerah yang telah berjalan sejak Januari 2001, dimaknai dengan berlomba-lombanya semua daerah untuk menggenjot sumber penerimaan tanpa memperhitungkan berbagai kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkannya seperti penurunan tingkat pendapatan dan karenanya kesejahteraan petani dan unit kegiatan masyarakat, menurunnya minat investor untuk melakukan investasi di sektor-sektor tertentu karena banyaknya biaya yang harus ditanggung, degradasi kualitas lingkungan hidup, dan sebagainya.

Selain beberapa dampak negatif diatas, dampak lain juga signifikan dalam konteks praktek pemerintahan dan pembangunan nasional adalah penyempitan ruang ekonomi menjadi ruang administrasi yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Setiap daerah berlomba-lomba mengeluarkan regulasi untuk meningkatkan pendapatan daerahnya tanpa memperhitungkan konsekuensinya bagi daerah lain. Secara langsung, tipikal regulasi yang demikian telah membatasi transaksi ekonomi lintas batas, bahkan di dalam lingkup wilayah yang sebenarnya saling tergantung satu sama lain. Praktek yang demikian sekaligus mengingkari bingkai besar dalam pembangunan nasional yang seharusnya berada dalam payung negara

kesatuan. Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa implementasi otonomi telah diiringi oleh pembentukan “negara-negara boneka” di dalam negara kesatuan (Tarigan, 2005 :46).

Berdasarkan uraian di atas dan perbandingan dari Tabel. 1.1 dan Tabel. 1.2 dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pemda Propinsi Riau tidak sebanding dengan realisasi pengeluaran pemda Propinsi Riau. Ini dikarenakan realisasi pengeluaran lebih besar dari realisasi penerimaan, sehingga pengelolaan keuangan daerah Propinsi Riau tidak bisa berjalan secara maksimal. Sehingga pada akhirnya penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh peran pemerintah daerah di Propinsi Riau melalui kebijakan fiskal daerah. Serta mengukur efisiensi kinerja pemerintah khususnya dalam struktur penerimaan dan struktur belanja/pengeluaran pemerintah kabupaten/kota di daerah Propinsi Riau, oleh karena itu penulis mengambil judul **“EFISIENSI KEBIJAKAN FISKAL DAERAH DI PROPINSI RIAU : STUDI KASUS RIAU DARATAN PERIODE 2003-2004”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah, diantaranya:

- 1) Seberapa besar tingkat efisiensi kebijakan fiskal daerah di Propinsi Riau khususnya Riau Daratan?

- 2) Apakah terdapat inefisiensi dari pengukuran kebijakan fiskal daerah terhadap perkembangan perekonomian Kabupaten/Kota di Propinsi Riau khususnya Riau Daratan?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis tingkat efisiensi kebijakan fiskal daerah di Propinsi Riau khususnya Riau Daratan.
2. Untuk mengetahui apakah ada inefisiensi dari pengukuran kebijakan fiskal daerah terhadap perkembangan perekonomian Kabupaten/Kota di Propinsi Riau khususnya Riau Daratan.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
2. Bagi Pemerintah Daerah di Propinsi Riau (instansi terkait) sebagai bahan pertimbangan dalam mengukur penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah / menentukan kebijakan.
3. Bagi peneliti lain, sebagai bahan referensi dalam penelitiannya yang terkait dengan penelitian ini.

4. Bagi Universitas, sebagai tambahan bahan pustaka serta sebagai tambahan pengetahuan bagi pembaca atau mahasiswa yang memerlukan informasi mengenai kinerja kebijakan fiskal di Propinsi Riau.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi terbagi menjadi tujuh bab dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, adapun penyusunan bab tersebut adalah :

BAB I. Latar Belakang Masalah

Bab ini berisi deskripsi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. Tinjauan Umum Subyek Penelitian

Bab ini menyajikan tentang tinjauan umum yaitu mengenai letak dan keadaan geografis, keadaan penduduk, administrasi wilayah, serta keadaan perekonomian.

BAB III. Kajian Pustaka

Bab ini berisi pengkajian hasil dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

BAB IV. Landasan Teori

Bab ini berisi mengenai teori yang akan digunakan untuk mendekati permasalahan yang akan diteliti.

BAB V. Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data.

BAB VI. Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini berisi analisis dan pembahasan dari hasil analisis.

BAB VII. Kesimpulan dan Implikasi

Bab ini berisi kesimpulan yang telah diambil dari tulisan yang dibuat serta implikasi yang dikemukakan oleh penulis terhadap hasil yang dibuat.



BAB II

TINJAUAN UMUM SUBYEK PENELITIAN

2.1. Keadaan Geografis di Propinsi Riau

Propinsi Riau secara geografis, geoekonomi dan geopolitik terletak pada jalur yang sangat strategis baik pada masa kini maupun pada masa yang akan datang karena terletak pada jalur perdagangan Regional dan Internasional di kawasan ASEAN melalui kerjasama IMT-GT dan IMS-GT. Setelah terjadi pemekaranan wilayah, Propinsi Riau yang dulunya terdiri dari 16 Kabupaten/Kota sekarang hanya tinggal 11 Kabupaten/Kota setelah Propinsi Kepulauan Riau terhitung 1 Juli 2004 resmi menjadi provinsi ke 32 di Indonesia. Propinsi Riau sebelum dimekarkan menjadi 2 (dua) Propinsi mempunyai luas 235.306 km² atau 71,33 persen merupakan daerah lautan dan hanya 94.561,61 km² atau 28,67 persen daerah daratan. Di daerah perairan terdapat 3.214 pulau besar dan kecil. Sebanyak 743 pulau telah memiliki nama dan sisanya belum. Mayoritas pulau-pulau kecil yang tersebar di perairan Laut Cina Selatan belum berpenghuni. Daerah lautan yang berbatasan dengan negara lain diperkirakan secara ZEE (Zone Ekonomi Eksklusif) adalah 379.000 km². Keberadaannya membentang dari lereng Bukit Barisan sampai ke Laut Cina Selatan, terletak antara 1°15' Lintang Selatan sampai 4°45' Lintang Utara atau antara 100°03'-109°19' Bujur Timur Greenwich dan 6°50'-1°45' Bujur Barat Jakarta. Di daerah daratan terdapat 15 sungai diantaranya ada 4 sungai yang mempunyai arti penting sebagai sarana perhubungan seperti:

- a) Sungai Siak (300 km) dengan kedalaman 8-12 m
- b) Sungai Rokan (400 km) dengan kedalaman 6-8 m
- c) Sungai Kampar (400 km) dengan kedalaman sekitar 6 m
- d) Sungai Indragiri (500 km) dengan kedalaman sekitar 6-8 m.

Keempat sungai yang membelah dari pegunungan daratan tinggi Bukit Barisan bermuara di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan itu dipengaruhi pasang surut laut.

Batas-batas daerah Riau adalah:

- a) Sebelah Utara: Selat Singapura dan Selat Malaka
- b) Sebelah Selatan: Propinsi Jambi dan Selat Berhala
- c) Sebelah Timur: Laut Cina Selatan
- d) Sebelah Barat: Propinsi Sumatera Barat dan Propinsi Sumatera Utara

Daerah Riau beriklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 2000-3000 mm/tahun yang dipengaruhi oleh musim kemarau serta musim hujan. Rata-rata hujan per tahun sekitar 160 hari. Jika dibandingkan banyaknya hari hujan dalam tahun 2003 dengan banyaknya hari hujan pada tahun 2002 terjadi kenaikan sebesar 7,7 persen. Kota yang paling sering ditimpa hujan setiap tahun adalah Pekanbaru yaitu 212 hari, Kabupaten Pelalawan 179 hari, Kabupaten Rokan Hilir 178 hari, dan yang terakhir adalah Kabupaten Siak 170 hari. Menurut catatan Stasiun Meteorologi Simpang Tiga, suhu udara rata-rata di Kota Pekanbaru menunjukkan optimum pada $27,6^{\circ}$ Celcius dalam interval $23,4-33,4^{\circ}$ Celcius. Kejadian kabut tercatat terjadi sebanyak 45 kali pada tahun 2003 dan

paling banyak terjadi pada bulan Mei dan Juni yaitu sebanyak 13 kali (<http://riau.go.id>).

2.2. Penduduk di Propinsi Riau

Berdasarkan data dari BPS Propinsi Riau pertumbuhan penduduk Riau relatif tinggi yaitu 3,79% per tahun selama periode 1998-2002, lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan penduduk nasional sebesar 1,4% per tahun pada periode yang sama. Penyebab tingginya pertumbuhan penduduk Riau disebabkan oleh tingginya migrasi dari daerah lain sebagai akibat perputaran roda perekonomian dan peluang lapangan kerja di Propinsi Riau dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Berdasarkan data Sensus tahun 2000 jumlah penduduk yang bermigrasi ke Propinsi Riau mencapai 206.514 jiwa. Dinamika perekonomian Propinsi Riau menjadi incaran masyarakat di luar Riau untuk datang ke Riau dalam rangka mendapatkan pekerjaan.

Komposisi penduduk yang berusia produktif juga meningkat. Berdasarkan hasil Sensus dan survey yang dilaksanakan oleh BPS menunjukkan bahwa penduduk dengan kelompok umur 0-14 tahun memiliki kecenderungan menurun, dari 35,06% pada tahun 1998 menurun menjadi 32,60% pada tahun 2002, sedangkan penduduk dengan kelompok umur 15-64 tahun memiliki kecenderungan meningkat, yaitu 62,88% pada tahun 1998 menjadi 65,55% pada tahun 2002. Ditinjau dari Angka Beban Ketergantungan (ABT) penduduk usia produktif pada periode 1998-2002 menunjukkan kecenderungan terus menurun, yaitu dari 59,02% pada tahun 1998 turun menjadi 52,55% pada tahun 2002. Sisi

lain dari komposisi penduduk adalah heterogenitas penduduk Riau, dengan latar belakang asal-usul, budaya, adat istiadat, agama dan kepercayaan yang berbeda-beda, namun mereka tetap hidup dalam kebersamaan dan kedamaian. Pertikaian kecil yang bersumber dari kesalahpahaman beberapa oknum di antara mereka, segera dapat diatasi oleh Pemerintah setempat dengan dukungan aparat keamanan dan organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan dan atau peguyuban-peguyuban, sehingga tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar, seperti yang terjadi di daerah-daerah lain (<http://riau.go.id>).

Tabel. 2.1
Banyaknya Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk
Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Riau Daratan
(Hasil Sensus Penduduk 2000)

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Banyaknya Penduduk	Kepadatan Penduduk Per-Km ²
Kabupaten :			
Kuantan Singingi	7.656,03	216.732	28,31
Indragiri Hulu	8.198,26	247.306	30,17
Indragiri Hilir	11.605,97	555.701	47,88
Pelalawan	11.987,90	152.949	12,76
Siak	8.423,08	238.786	28,35
Kampar	9.756,74	447.157	45,83
Rokan Hulu	6.163,68	265.686	43,10
Bengkalis	11.614,78	520.241	44,79
Rokan Hilir	8.881,59	352.299	39,67
Kota :			
Pekanbaru	446,50	585.440	1.311,18
Dumai	1.727,38	173.188	100,26
Jumlah (Riau Daratan)	86.461,91	3.755.485	1.732,30

Sumber : BPS, Riau Dalam Angka 2003

Berdasarkan data dari BPS Propinsi Riau khususnya Riau Daratan (Tabel 2.1), menunjukkan jumlah penduduk berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2000 tercatat 3.755.485 jiwa. Penyebaran penduduk di Riau Daratan belum merata. Hal ini dapat dilihat pada tingkat kepadatan penduduk di Kota Pekanbaru

yang begitu mencolok, yaitu 1.311,18 per-km². Ini tidak sebanding dengan luas wilayah Kota Pekanbaru yang hanya 446,50 kilometer persegi. Selain itu, untuk kabupaten yang memiliki jumlah penduduk paling banyak adalah Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 555.701 jiwa dengan kepadatan penduduk 47,88 per-km². Sedangkan kabupaten yang memiliki jumlah penduduk paling kecil adalah Kabupaten Pelalawan sebesar 152.949 jiwa dengan kepadatan penduduk 12,76 per-km² (BPS, Riau Dalam Angka, 2003 : 57).

2.3. Pemerintahan Daerah Propinsi Riau

Sebagai daerah Tingkat I Propinsi Riau, dikepalai oleh seorang Gubernur/Kepala Daerah dengan dua orang Wakil Gubernur, yaitu Wakil Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan serta Wakil Gubernur Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Di dalam melaksanakan tugasnya, ada 3 organisasi perangkat staf pemerintah daerah, yaitu Sekretaris Wilayah Daerah (Sekwilda); Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Badan Pengawas Daerah (Bawasda). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) disamping bertugas secara teknis, juga mengkoordinir dan mengintegrasikan usaha, penyusunan rencana dan program kerja. Badan Pengawas Daerah (Bawasda) merupakan unsur pengawas dengan tugas pokok melakukan pengawasan umum atas jalannya roda pemerintahan daerah sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku (BPS, Riau dalam angka, 2003).

2.4. Perekonomian Propinsi Riau

2.4.1. Pendapatan Regional

Hingga kini alat untuk mengukur tingkat kemakmuran masyarakat suatu daerah secara tepat sulit ditemukan, namun secara tidak langsung, salah satu ukuran yang dianggap dapat mendekati pencapaian kemakmuran tersebut yakni dengan menggunakan angka pendapatan regional. Manfaat pendapatan regional antara lain adalah untuk mengetahui tingkat produk yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi, besarnya laju pertumbuhan ekonomi, dan struktur perekonomian pada suatu periode di suatu daerah tertentu.

2.4.1.1. Produk Domestik Regional Bruto

Membaiknya pertumbuhan ekonomi dunia yang membawa dampak langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan termasuk Riau. Hal ini tercermin pada tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semula hanya tumbuh 4,09 persen pada tahun 2002 naik pada tahun 2003 menjadi sebesar 4,60 persen. Sedangkan di daerah khususnya Riau pertumbuhan ekonomi pada tahun 2002 tumbuh sebesar 5,59 persen naik menjadi 6,24 persen pada tahun 2003. Angka PDRB atas dasar harga konstan 1993 tanpa migas tahun 2003 (Tabel 2.2) mencapai sebesar 11.383,36 milyar rupiah yang lebih tinggi dari tahun 2002 yakni sebesar 10.714,36 milyar rupiah.

Tabel 2.2
 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 1993
 menurut Lapangan Usaha Tanpa Migas
 2001 – 2003
 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2001	2002 f)	2003 x)
1. Pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan	1.935.106,25	2.038.889,80	2.149.103,25
2. Pertambangan dan penggalian	255.266,48	271.817,71	289.904,53
3. Industri pengolahan	3.456.475,81	3.619.717,92	3.821.336,20
4. Listrik, gas dan air bersih	106.858,32	112.518,26	118.928,01
5. Bangunan	579.578,22	618.352,01	667.214,44
6. Perdagangan, hotel dan restoran	1.818.386,34	1.928.499,04	2.041.870,84
7. Pengangkutan dan komunikasi	728.538,69	802.544,13	861.550,72
8. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	572.837,05	586.897,38	655.777,24
9. Jasa-jasa	693.776,09	735.120,04	777.117,60
Jumlah	10.146.823,25	10.714.356,29	11.382.802,83

Sumber : BPS, Riau Dalam Angka 2003

f) Angka Perbaikan

xx) Angka Sementara

Jika diamati per lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Riau tahun 2003 tanpa migas atas dasar harga konstan 1993 secara ringkas dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1. Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh sebesar 5,41 persen.
2. Pertambangan dan Penggalian tumbuh sebesar 6,65 persen.
3. Industri Pengolahan tumbuh sebesar 5,57 persen.
4. Listrik dan Air Bersih tumbuh sebesar 5,70 persen.
5. Bangunan tumbuh sebesar 7,90 persen
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran tumbuh sebesar 5,88 persen.
7. Pengangkutan dan Komunikasi tumbuh sebesar 7,35 persen.
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan tumbuh sebesar 11,74 persen.
9. Jasa-jasa tumbuh sebesar 5,71 persen.

2.4.1.2. Pendapatan Regional Per Kapita

Salah satu indikator yang dapat digunakan sebagai alat mengukur kemajuan pembangunan ekonomi suatu daerah adalah pendapatan per kapita. Angka ini diperoleh melalui nilai nominal PDRB dikurangi pajak tak langsung netto dan dikurangi lagi penyusutan kemudian dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Tabel 2.3
PDRB dan Pendapatan Regional per Kapita Termasuk Migas
1999 – 2003
(Rupiah)

Tahun	PDRB per Kapita	Pendapatan Regional per Kapita
I. Atas Dasar Harga Berlaku		
1999	11.440.781,74	10.628.486,24
2000	11.621.126,00	10.796.026,06
2001	12.155.703,51	11.292.648,56
2002 f)	12.236.066,48	12.296.305,76
2003 xx)	13.985.806,05	12.992.813,82
II. Atas Dasar Harga Konstan 1993		
1999	4.784.799,27	4.445.078,52
2000	4.549.363,07	4.226.358,29
2001	4.567.427,11	4.243.181,59
2002 f)	4.605.714,95	4.278.709,18
2003 xx)	4.685.803,10	4.353.111,08

Sumber : BPS, Riau Dalam Angka 2003

f) Angka Perbaikan

xx) Angka Sementara

Tabel 2.3 terlihat bahwa pendapatan per kapita Riau termasuk migas atas dasar harga berlaku sebesar 12,99 juta rupiah tahun 2003 lebih besar dari angka tahun 2002 sebesar 12,30 juta rupiah. Begitu juga bila diamati atas dasar harga konstan 1993 tercatat tahun 2002 sebesar 4,28 juta rupiah kemudian naik menjadi 4,35 juta rupiah pada tahun 2003.

2.4.2. Penerimaan Daerah

Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan. Pendapatan Daerah bersumber dari : Pendapatan Asli Daerah; Dana Perimbangan; dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

2.4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

2.4.2.1.1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ditetapkan melalui peraturan daerah. Pungutan ini dikenakan pada semua objek pajak seperti orang/badan, benda bergerak/tak bergerak. Dari peraturan pajak daerah yang ada beberapa di antaranya mempunyai biaya administrasi yang lebih tinggi daripada hasilnya (*high cost of collection*) sehingga hasilnya tidak memadai. Juga adanya beberapa jenis pajak yang tidak memadai untuk dipungut daerah, karena tumpang tindih dengan pajak lain, menghambat efisiensi alokasi sumber ekonomi, bersifat tidak adil, atau tidak benar-benar bersifat pajak, tetapi cenderung bersifat

retribusi. Untuk itu agar pajak daerah menjadi lebih efektif dan efisien, maka pada tahun 1997 pemerintah telah melakukan reformasi terhadap aturan pajak daerah dan retribusi yang ada sebelumnya untuk disesuaikan dengan perkembangan perekonomian nasional (Kurniawan, 2004: 1-3).

Tabel 2.4
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Kabupaten/Kota di Riau Daratan
(Milyar Rupiah)

Kabupaten/Kota	2003	2004 [*]
	Pajak Daerah	Pajak Daerah
Kuantan Singingi	1,19	1,44
Indragiri Hulu	1,22	1,51
Indragiri Hilir	5,31	4,11
Pelalawan	3,10	1,09
Siak	12,30	11,27
Kampar	3,85	3,85
Rokan Hulu	1,06	1,15
Bengkalis	10,54	5,61
Rokan Hilir	7,12	3,33
Pekanbaru	30,15	30,13
Dumai	3,24	3,33
Total	79,08	66,82

Sumber : BPS, Statistik Keuangan Pemda Propinsi Riau
) Data APBD

Kabupaten/Kota di Propinsi Riau khususnya Riau Daratan merupakan kabupaten/kota yang penerimaan pajak daerah yang mengalami penurunan yang sangat drastis. Walaupun ada beberapa kabupaten/kota yang mengalami kenaikan, itu hanya 4 kabupaten/kota saja. Tabel 2.4 menunjukkan perkembangan untuk pajak daerah dari 11

Kabupaten/Kota di Riau Daratan, Kota Dumai merupakan kota yang paling tinggi memperoleh pungutan pajak dari tahun 2003 hingga 2004. Hal ini dapat dilihat dari perolehan pajak daerah pada tahun 2003, dari Rp 3,24 milyar menjadi Rp 3,33 milyar pada tahun 2004 atau mengalami peningkatan sebesar 2,77%. Sedangkan untuk beberapa kabupaten lainnya, seperti Kabupaten Bengkalis mengalami penurunan yang begitu mencolok, dari Rp 10,54 milyar pada tahun 2003 menjadi Rp 5,61 milyar pada tahun 2004 atau mengalami penurunan sebesar 46,77 %.

2.4.2.1.2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran / pemakaian karena memperoleh jasa yang diberikan oleh daerah atau dengan kata lain retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan secara langsung dan nyata. Retribusi daerah terdiri dari pelayanan kesehatan, pengujian kendaraan bermotor, penggantian biaya cetak peta, pengujian kapal perikanan, pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir dan atau pertokoan, penjualan produksi daerah, ijin peruntukan penggunaan tanah, ijin trayek dan lain-lain.

Tabel 2.5
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah
Kabupaten/Kota di Riau Daratan
(Milyar Rupiah)

Kabupaten/Kota	2003	2004 ^{*)}
	Restribusi Daerah	Restribusi Daerah
Kuantan Singingi	2,73	3,16
Indragiri Hulu	2,73	2,76
Indragiri Hilir	11,11	14,07
Pelalawan	0,99	1,77
Siak	15,43	1,86
Kampar	5,18	5,38
Rokan Hulu	2,27	2,32
Bengkalis	4,90	5,28
Rokan Hilir	0,86	1,31
Pekanbaru	22,73	30,92
Dumai	4,60	4,43
Total	73,53	73,25

Sumber : BPS, Statistik Keuangan Pemda Propinsi Riau
^{*)} Data APBD

Tabel 2.5 menunjukkan bahwa kabupaten yang memperoleh Retribusi Daerah paling tinggi meliputi beberapa kabupaten/kota, diantaranya Kabupaten Indragiri Hilir dengan tingkat perolehan 26,64 % atau meningkat dari Rp 11,11 milyar pada tahun 2003 menjadi Rp 14,07 milyar pada tahun 2004. Selain itu, daerah Kota Pekanbaru juga mengalami kenaikan yang cukup mencolok, yaitu Rp22,73 milyar pada tahun 2003 menjadi Rp 30,92 milyar pada tahun 2004 atau dengan persentase kenaikan sebesar 36,03 %.

Kabupaten yang mengalami penurunan yang cukup tajam dalam penerimaan retribusi daerahnya adalah kabupaten Siak, dari Rp 15,43 milyar pada tahun 2003 menjadi Rp 1,86 milyar pada tahun 2004, atau mengalami penurunan sebesar 87,94 %. Untuk kota Dumai, mengalami penurunan dari Rp 4,60 milyar pada tahun 2003 menjadi Rp 4,43 milyar pada tahun 2004 atau turun sebesar 3,69%. Dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Propinsi Riau khususnya Riau Daratan, kabupaten Siak dan kota Dumai mengalami penurunan dalam hal perolehan atau penerimaan retribusi daerahnya.

2.4.2.2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut UU no. 25/1999 pasal 6, dana perimbangan berasal dari : Bagian Daerah (Dana Bagi Hasil) dari PBB, BPHTB, PPh orang pribadi dan SDA (Sumber Daya Alam); Dana Alokasi Umum (DAU); dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

2.4.2.2.1. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksud untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan

tugasnya melayani masyarakat. Penerimaan DAU kabupaten/kota di Riau Daratan rata-rata mengalami kenaikan yang cukup berarti, tetapi ada empat kabupaten/kota yang mengalami penurunan.

Tabel 2.6
Realisasi Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU)
Kabupaten/Kota di Riau Daratan
(Milyar Rupiah)

Kabupaten/Kota	2003	2004 ^{*)}
	DAU	DAU
Kuantan Singingi	126,54	125,43
Indragiri Hulu	130,66	162,26
Indragiri Hilir	185,89	203,82
Pelalawan	91,46	109,00
Siak	101,29	99,11
Kampar	147,42	185,10
Rokan Hulu	93,89	104,14
Bengkalis	148,63	206,70
Rokan Hilir	99,05	91,84
Pekanbaru	161,80	164,75
Dumai	99,14	97,78
Total	1.385,77	1.549,93

Sumber : BPS, Statistik Keuangan Pemda Propinsi Riau
) Data APBD

Berdasarkan data dari BPS Propinsi Riau (Tabel 2.6), beberapa kabupaten/kota yang ada di Riau Daratan mengalami penurunan DAU dari pemerintah pusat. Antara lain kabupaten Kuantan Singingi dari tahun 2003 sebesar Rp126,54 milyar menjadi Rp 125,43 milyar pada tahun 2004 atau

turun 0,88%; Kabupaten Siak dari Rp 101,29 milyar pada tahun 2003 menjadi Rp 99,11 milyar pada tahun 2004 atau turun sebesar 2,15%; Kabupaten Rokan Hilir dengan persentase penurunan 7,27% dan terakhir Kota Dumai dengan persentase penurunan sebesar 1,37%.

Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan transfer dana dari pemerintah pusat adalah Kabupaten Indragiri Hulu, dari Rp 130,66 milyar pada tahun 2003 menjadi Rp 162,26 milyar pada tahun 2004 atau naik 24,18%. Sedangkan Kabupaten Indragiri Hilir naik sebesar 9,64% atau Rp 185,89 milyar pada tahun 2003 menjadi Rp 203,82 milyar pada tahun 2004.

2.4.3. Belanja Daerah

2.4.3.1 Belanja Rutin / Belanja Aparatur Daerah

Belanja Rutin atau Belanja Aparatur Daerah adalah bagian belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/pembangunan yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik). Belanja rutin ini terdiri dari : Belanja Pegawai; Belanja Barang dan Jasa; Belanja Perjalanan Dinas; Biaya Pemeliharaan; Belanja Lain-lain; dan Belanja Modal. Pengeluaran belanja rutin kabupaten/kota yang ada di Propinsi Riau Khususnya Riau Daratan mengalami kenaikan dan penurunan, ini dapat dilihat dari perkembangan pada 11 kabupaten/kota.

Tabel 2.7
Realisasi Pengeluaran Belanja Rutin
Kabupaten/Kota di Riau Daratan
(Milyar Rupiah)

Kabupaten/Kota	2003	2004 ^{*)}
	Belanja Rutin	Belanja Rutin
Kuantan Singingi	54,30	48,47
Indragiri Hulu	138,71	158,66
Indragiri Hilir	168,89	158,96
Pelalawan	102,26	139,33
Siak	320,03	287,69
Kampar	162,13	143,50
Rokan Hulu	82,00	78,43
Bengkalis	333,31	366,59
Rokan Hilir	254,98	315,45
Pekanbaru	252,29	283,03
Dumai	136,87	140,13
Total	2.005,77	2.120,24

*Sumber : BPS, Statistik Keuangan Pemda Propinsi Riau
) Data APBD

Tabel 2.7 menunjukkan bahwa untuk beberapa kabupaten/kota di Riau Daratan mengalami peningkatan belanja rutin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, diantaranya adalah Kabupaten Rokan Hilir yang mengalami peningkatan belanja rutin dari tahun 2003 sebesar Rp 254,98 milyar menjadi Rp 315,45 milyar pada tahun 2004 atau 23,71%. Diantara 11 kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Riau, khususnya Riau Daratan, Kabupaten Rokan Hilir yang paling besar mengeluarkan belanja rutin selama kurun waktu 2003 sampai 2004.

Pengeluaran belanja rutin yang paling terkecil sekaligus tidak mengeluarkan dana yang begitu besar yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten adalah pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, yaitu dari Rp 82,00 milyar pada tahun 2003 menjadi Rp 78,43 milyar pada tahun 2004, atau mengalami penurunan sebesar 4,35 %.

2.4.3.2. Belanja Pelayanan Publik

Belanja Pelayanan Publik adalah bagian belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/pembangunan yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik). Belanja ini terdiri dari : Belanja Pegawai; Belanja Barng dan Jasa; Belanja Perjalanan Dinas; Biaya Pemeliharaan; Belanja Lain-lain; Belanja Modal; Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan; dan Pengeluaran Tidak Tersangka.

2.4.3.2.1. Belanja Modal/Pembangunan

Belanja modal/pembangunan adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah aset). Belanja modal/pembangunan terdiri dari belanja modal tanah; belanja modal jalan dan jembatan; belanja modal bangunan air (irigasi); belanja modal instalasi; belanja modal jaringan; belanja modal bangunan gedung; belanja modal monumen; belanja modal alat-alat besar; belanja modal alat-alat angkutan; belanja modal alat-alat bengkel; belanja modal alat-alat pertanian; belanja

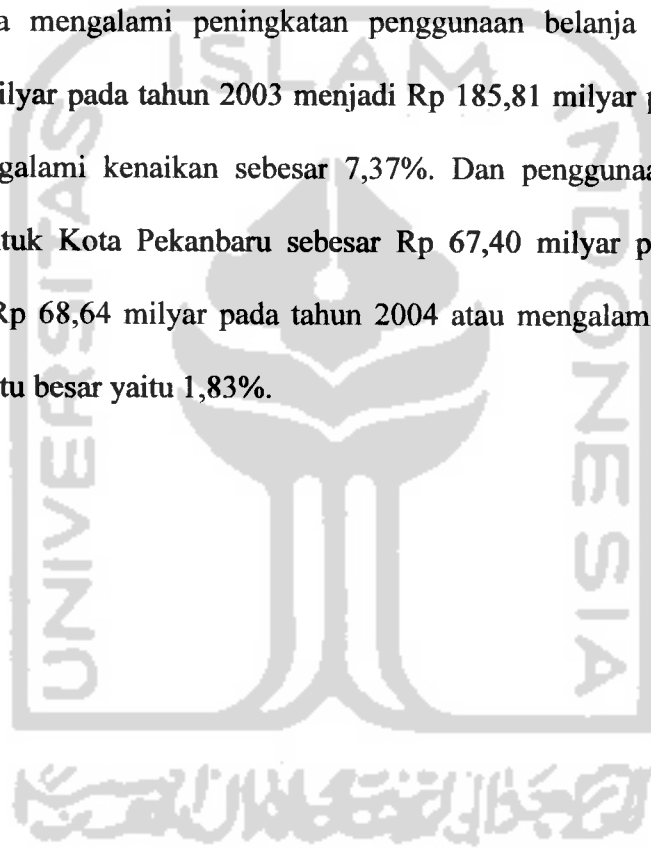
modal alat-alat kantor dan rumah tangga; belanja modal alat-alat studio; belanja modal alat-alat komunikasi; belanja modal alat-alat kedokteran; belanja modal alat-alat laboratorium; belanja modal buku/perpustakaan; belanja modal barang bercorak kesenian dan kebudayaan; belanja modal hewan, ternak serta tanaman; dan belanja modal alat-alat persenjataan/keamanan (BPS, 2003-2004).

Tabel 2.8
Realisasi Penggunaan Belanja Modal
Kabupaten/Kota di Riau Daratan
(Milyar Rupiah)

Kabupaten/Kota	2003	2004 ^{*)}
	Belanja Modal	Belanja Modal
Kuantan Singingi	126,39	110,11
Indragiri Hulu	135,38	143,00
Indragiri Hilir	173,05	185,81
Pelalawan	168,52	143,22
Siak	377,04	356,64
Kampar	322,92	166,71
Rokan Hulu	86,84	49,04
Bengkalis	744,88	732,11
Rokan Hilir	430,33	268,36
Pekanbaru	67,40	68,64
Dumai	78,50	58,08
Total	2.711,25	2.281,72

Sumber : BPS, Statistik Keuangan Pemda Propinsi Riau
^{*)} Data APBD

Tabel 2.8 menunjukkan realisasi penggunaan belanja modal/pembangunan kabupaten/kota di Riau Daratan. Kabupaten Indragiri Hulu mengalami kenaikan dalam penggunaan belanja modal, yaitu dari Rp 135,38 milyar pada tahun 2003 menjadi Rp 143,00 milyar pada tahun 2004 atau mengalami kenaikan sebesar 5,62%. Sedangkan untuk Kabupaten Indragiri Hilir juga mengalami peningkatan penggunaan belanja modal dari Rp 173,05 milyar pada tahun 2003 menjadi Rp 185,81 milyar pada tahun 2004 atau mengalami kenaikan sebesar 7,37%. Dan penggunaan dana belanja modal untuk Kota Pekanbaru sebesar Rp 67,40 milyar pada tahun 2003 menjadi Rp 68,64 milyar pada tahun 2004 atau mengalami kenaikan yang tidak begitu besar yaitu 1,83%.



BAB III

KAJIAN PUSTAKA

Guna menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki arti penting sehingga diketahui kontribusi penelitian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, maka penulis mengambil beberapa acuan ataupun pedoman dari penelitian sebelumnya. Dibawah ini disajikan beberapa penelitian sebelumnya yang erat kaitannya dengan penelitian ini, antara lain:

Asnita Frida Sebayang, mengadakan penelitian mengenai “Kinerja Kebijakan Fiskal Daerah di Indonesia Pasca Krisis”. Dalam penelitian ini, menggunakan teknik pengukuran kinerja yang banyak digunakan yakni *Data Envelopment Analysis (DEA)*. Pengembangannya didasarkan pada programasi linear pada pengukuran kinerja relatif antar Unit Kegiatan Ekonomi (UKE). Pengukuran kinerja kebijakan fiskal daerah pada studi ini menggunakan lima variabel (DAU, Belanja Rutin, Pengeluaran untuk Transportasi, Pajak, dan Retribusi). Wilayah yang diamati mencakup 26 propinsi pada empat periode (1999-2002), dan melibatkan banyak wilayah yang mempunyai kapasitas yang berbeda, khususnya perbedaan kapasitas fiskal. Untuk itu, dilakukan penghitungan nilai riil dengan membagi setiap variabel dengan inflasi (*deflator*). Variabel-variabel dalam nilai riil ini dianggap akan lebih mewakili perilaku daerah sebenarnya. Kriteria efisiensi pada suatu UKE terkait dengan tujuannya. UKE yang berorientasi pada laba akan berbeda tujuannya dengan UKE yang

berorientasi pada maksimasi utilitas (sektor publik). Pengukuran kinerja kebijakan fiskal juga memiliki ciri yang spesifik. Pada sektor publik mengatasi sumber inefisiensi tidak bisa sefleksibel sektor swasta. Banyak variabel sudah bersifat “given”, misalnya anggaran daerah biasanya sudah tertentu dan sulit diintervensi. Informasi inefisiensi dapat digunakan pada pola anggaran berikutnya dengan berbagai pertimbangan. Pengukuran biasa terhadap efisiensi relatif dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Kebijakan Fiskal} = \frac{\text{Jumlah Output yang dibobot}}{\text{Jumlah Input yang dibobot}}$$

Hasil perhitungan dengan teknik *Data Envelopment Analysis* menunjukkan bahwa terdapat dua wilayah yang mencapai efisiensi terbaik yakni DKI Jakarta dan Jawa Timur. Kedua wilayah ini dikategorikan sebagai wilayah yang mampu memanfaatkan sumber daya keuangan daerah dengan optimal. Dengan catatan, tolak ukur keberhasilannya adalah kemampuan mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi. Ada juga wilayah yang mencapai efisiensi yang baik, namun tidak konsisten seperti wilayah: Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Nusa Tenggara Barat. Wilayah-wilayah yang memiliki konflik internal juga cenderung memiliki efisiensi yang rendah. Daerah itu adalah: Papua, Maluku, Kalimantan Tengah dan Nangro Aceh Darussalam (NAD). Keempat wilayah ini teridentifikasi sebagai wilayah yang mencapai efisiensi terendah pada periode pengamatan.

Kondisi ini cukup memprihatinkan mengingat pajak dan retribusi merupakan sumber penting terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kesenjangan pencapaian efisiensi kebijakan fiskal ini juga merupakan gambaran kesenjangan kemampuan pengelolaan keuangan daerah dan kesenjangan sumber daya wilayah. Ini dapat dilihat dari identifikasi sumber inefisiensi di masing-masing wilayah yang cukup beragam. Ada wilayah yang inefisien pada variabel input, namun banyak pula yang inefisiensi pada variabel output.

Hasil analisis menunjukkan kesimpulan bahwa kapasitas fiskal daerah di Indonesia sangat bervariasi bahkan cenderung menunjukkan adanya kesenjangan kapasitas fiskal antar daerah. Pada periode 1999-2002, wilayah yang mampu membiayai belanja rutin bersumber dari PAD hanya Jawa Timur dan Bali. Kondisi ini cukup mengkhawatirkan sehingga diperlukan upaya lebih lanjut agar daerah mampu “membiayai” pengeluarannya. Dari perhitungan kinerja kebijakan fiskal menunjukkan adanya variasi bobot kinerja yang tinggi. Terdapat dua wilayah yang konsisten mencapai efisiensi tertinggi pada pungutan yakni DKI Jakarta dan Jawa Timur. Kedua daerah ini kemudian bisa mencapai referensi bagi daerah lain untuk peningkatan kinerja kebijakan fiskalnya. Dan mampu mencapai 100 persen efisiensi selama empat periode. Pada wilayah yang belum efisien memiliki sumber inefisiensi yang relatif beragam. Konsekuensinya, kebijakan untuk masing-masing daerah harus spesifik dengan tetap membandingkan terhadap perkembangan wilayah lain.

Rinaldi Rustam mengadakan penelitian mengenai “ Analisis Efisiensi Teknis Bank Devisa Nasional Dengan Menggunakan Metode Non Parametrik : *Data Envelopment Analysis (DEA)*”. Menurutnya dalam beberapa dekade terakhir, peranan pemerintah dalam membiayai pembangunan semakin terbatas, sejalan dengan semakin terbatasnya penerimaan pemerintah. Keadaan ini memaksa pemerintah berusaha meningkatkan peran perhimpunan dana masyarakat di sektor keuangan, termasuk sektor perbankan. Pemerintah mengeluarkan berbagai paket kebijakan deregulasi di sektor perbankan, diantaranya Paket 1 Juni 1983 (Pakjun 83) dan Paket 27 Oktober 1988 (Pakto 88); Pakjun 83 memberikan kebebasan dalam penetapan tingkat bunga oleh masing-masing bank, yang sebelumnya dipagu oleh pemerintah. Melalui Pakto 88 diberikan kemudahan pendirian Bank, dengan modal hanya Rp 10 Milyar dapat didirikan Bank Umum dan dengan modal Rp 50 Juta dapat didirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Kedua paket kebijakan deregulasi telah dapat meningkatkan kinerja perbankan nasional, dan mendorong perkembangan perbankan secara cepat. Berbagai penelitian yang kemudian dilakukan juga mendukungnya. Berbagai paket kebijakan deregulasi ini telah dapat meningkatkan Jumlah Bank, dari 70 Bank (tahun 1988) menjadi 240 Bank pada tahun 1996, dengan kantor cabang 5.919, belum termasuk BPR dan Lumbung Desa. Begitu juga dengan jumlah dana yang dihimpun dan disalurkan perbankan meningkat sepuluh kali lipat pada periode yang sama.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tingkat efisiensi teknis perbankan nasional dari segi biaya secara individu sebelum dan sesudah krisis dengan menggunakan metode DEA dan mengetahui apakah ada perbedaan tingkat

efisiensi teknis masing-masing bank dibandingkan sebelum krisis dengan setelah krisis. Disamping itu penelitian ini juga secara khusus bertujuan membandingkan hasil penelitian ini/metode non Parametrik dengan penelitian sebelumnya dengan menggunakan metode parametrik.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan deskriptif analisis, guna menganalisis tingkat efisiensi teknis masing-masing individu perbankan devisa nasional dengan menggunakan pendekatan non parametric *Data Envelopment Analysis* (DEA). Dalam hal ini menggunakan data 27 perbankan devisa nasional. Adapun penggunaan data Bank devisa nasional karena bank tersebut relatif mempunyai input dan output yang lebih variatif dibanding bank non devisa, disamping struktur permodalannya relatif kuat. Faktor lain yang penulis pertimbangkan dalam penggunaan data bank nasional karena bank ini relatif lengkap data yang mereka laporkan ke bank Indonesia sebagai lembaga yang ditugasi mengawasi bank di Indonesia.

Pengukuran efisiensi teknis Bank devisa Nasional ini dengan metode DEA tingkat efisiensi teknis suatu organisasi atau suatu unit kegiatan ekonomi (UKE), banyak melibatkan berbagai input maupun juga output. Sehingga hasil skor efisiensi teknis perbankan yang didapat diharapkan lebih akurat dibanding metode lainnya. Karena data input dan output yang digunakan lebih variatif. Disamping itu penggunaan metode non parametrik DEA dan juga diharapkan dapat lebih mudah di analisis dalam menentukan tingkat efisiensi teknis dari perbankan nasional. Dari hasil empiris *Data Envelopment Analysis* (DEA) dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Penelitian dengan metode non parametrik DEA ini menggunakan data 27 bank devisa nasional, karena bank mempunyai struktur input maupun output yang lebih variatif dibanding bank non devisa. Disamping itu bank devisa relatif lengkap melaporkan datanya ke Bank Indonesia.
- 2) Dari hasil empiris, sebelum krisis/ tahun 1993 terdapat 62,5 % bank devisa nasional (45 bank) yang mencapai tingkat efisiensi relatifnya tinggi/dengan skor efisiensi 100% (sempurna). Sedangkan 27 bank devisa nasional mempunyai skor efisiensi dibawah 100% (kurang efisien).
- 3) Setelah terjadinya krisis perbankan/tahun 1997 terjadi penurunan tingkat efisiensi perbankan devisa nasional secara rata-rata, hanya 37,5% Bank yang mencapai skor efisiensi 100 %. Secara rinci; terdapat 42 bank yang skor efisiensinya menurun (sebagian besar mengalami penurunan kurang dari 30 %), 22 bank skor efisiensinya tetap. Dan yang menarik terdapat 8 Bank yang skor efisiensinya malah meningkat pada saat krisis (Bank BTN, Panin, Bira, Sahid Gajah Perkasa, Namura, Hastin).
- 4) Namun secara rata-rata skor efisiensi teknis perbankan devisa nasional masih relatif tinggi pada kedua periode, dengan skor efisiensi masih diatas 70 %. Tahun 1993/sebelum krisis 98,61 % dan pada tahun 1997 (setelah krisis perbankan) sebesar 83,33 %.
- 5) Dengan membandingkan hasil empiris pengukuran efisiensi teknis perbankan menggunakan DEA ini (non parametrik), dengan penelitian sebelumnya (parametrik) dengan data yang relatif yang sama, secara umum dapat disimpulkan bahwa kedua pendekatan memberikan hasil yang relatif sama.

Tri Kunawangsih mengadakan penelitian mengenai “Efisiensi Unit-unit Kegiatan Ekonomi Industri Logam Dasar Non Besi dan Baja (ISIC 372) Indonesia Tahun 1996 dan 1998”. Pengukuran efisiensi industri logam dasar pada penelitian ini menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA). Dengan metode ini pengukuran efisiensi suatu organisasi atau unit kegiatan ekonomi (UKE) yang banyak melibatkan input ataupun output lebih mudah dianalisis.

Tabel 3.1
Jenis input dan output yang digunakan dalam model penelitian

VARIABEL	KETERANGAN	KODE
A	UKE Industri pembuatan logam dan bukan besi (ISIC 37201)	
B	UKE Industri pengecoran logam bukan besi (ISIC 37202)	
C	UKE Industri penggilingan logam bukan besi (ISIC 37203)	
D	UKE Industri ekstrusi bukan besi (ISIC 37204)	
E	UKE Industri penempaan logam bukan besi (ISIC 37205)	
	INPUT	
X ₁	Bahan baku (Rp 000)	Bhn baku
X ₂	Bahan penolong (Rp 000)	Tinpu
X ₃	Upah pekerja produksi (Rp 000)	WPKJPROD
X ₄	Upah pekerja nonproduksi (Rp 000)	WPKJNPROD
X ₅	Pekerja produksi (orang)	PKJPROD
X ₆	Pekerja non produksi (orang)	PKJNPROD
X ₇	Bahan bakar (Rp 000)	Bhn bakar
X ₈	Modal (Rp 000)	Investasi
	OUTPUT	
Q ₁	Nilai produksi	NPROD
Q ₂	Total output	TOUTPUT
Q ₃	Nilai tambah	VALUEAD

Secara matematis formulasi DEA dapat ditunjukkan sebagai berikut :

$$\text{Maksimumkan } Z_k = \sum_{r=1}^s U_r k \cdot Y_{rk}$$

Dengan batasan/kendala :

$$(P_k) \sum_{r=1}^s U_r k \cdot Y_{rk} - \sum_{i=1}^m V_i k X_{ij} : j = 1, \dots, n$$

$$(Q_k) V_i k X_{ik} - 1$$

$$U_{rk}^3 \geq 0 ; r = 1, \dots, s$$

$$V_{rk}^3 \geq 0 ; i = 1, \dots, m$$

V_{ik} = bobot yang diberikan pada input i oleh UKE k

U_{rk} = bobot yang diberikan pada output r oleh UKE k

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan program DEA terhadap tingkat efisiensi pada lima unit kegiatan ekonomi pada industri logam dasar non besi dan baja (ISIC 372) pada tahun 1996 dan 1998 adalah sebagai berikut :

- ISIC 37201 yakni industri pembuatan logam dan bukan besi (UKE A) telah efisien.
- ISIC 37202 yakni industri pengecoran logam bukan besi (UKE B) telah efisien.
- ISIC 37203 yakni industri penggilingan logam bukan besi (UKE C) belum efisien. Pada tahun 1996 efisiensinya mencapai 90,17 %, dan pada tahun 1998 mengalami peningkatan menjadi 92,84 %. Inefisien industri ini terjadi karena pemborosan pembangunan bahan baku, bahan penolong, upah non produksi, biaya bahan bakar dan investasi.
- ISIC 37204 yakni industri bukan besi (UKE D) telah efisien.
- ISIC 37205 yakni industri penempaan logam bukan besi (UKE E) telah efisien.

Lela Dina Pertiwi, mengadakan penelitian tentang “Efisiensi Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan: Studi Kasus di Jawa Tengah Tahun 1999 dan 2002”. Analisis ini merumuskan permasalahan, diantaranya berapa besar tingkat efisiensi pengeluaran pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah di sektor pendidikan dan kesehatan. Dengan tujuan untuk menganalisis besarnya tingkat efisiensi pengeluaran pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah pada sektor pendidikan dan kesehatan. Metode yang digunakan pada analisis ini adalah menggunakan pendekatan non parametrik *Data Envelopment Analysis* (DEA) dengan menggunakan data 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 1999 dan 2002. Analisis ini dimaksudkan untuk pengukuran efisiensi suatu organisasi atau unit kegiatan ekonomi (UKE) yang melibatkan banyak input dan banyak output (*multi-input multi-output*).

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan program DEA terhadap tingkat efisiensi pengeluaran pendidikan dan kesehatan pada 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 1999 dan 2002 adalah sebagai berikut:

1. Tingkat efisiensi pengeluaran pendidikan pada tahun 1999 di setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah cenderung belum efisien. Tingkat efisiensi sempurna (100%) hanya pada Kota Salatiga, sedangkan untuk kabupaten/kota lainnya rata-rata tingkat efisiensinya dibawah 50%.
2. Tahun 2002 tingkat efisiensi pengeluaran pendidikan meningkat dari tahun sebelumnya (1999), namun masih dikategorikan belum efisien. Hanya Kabupaten Boyolali yang tingkat efisiensinya terbaik (100%), kemudian

Kota Salatiga 99,9%; Kota Magelang 88,8%; Kota Surakarta 54,3% dan Kabupaten Sragen 53,8%.

3. Tingkat efisiensi pengeluaran pemerintah daerah di sektor kesehatan tahun 1999 di kabupaten/kota Jawa Tengah mayoritas belum efisien. Hanya Kota Salatiga saja yang tingkat efisiensinya terbaik 100%. Sedangkan tingkat efisiensi di 34 kabupaten/kota Jawa Tengah rata-rata dibawah 50%.
4. Tahun 2002 tingkat efisiensi pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan sedikit membaik, terjadi peningkatan walaupun peningkatan tersebut tidak banyak. Kota Surakarta merupakan kota yang tingkat efisiensi pengeluaran kesehatannya sempurna 100%, lalu kabupaten Karanganyar 68,84% dan untuk kabupaten/kota lainnya rata-rata tingkat efisiensinta dibawah 50%.

Sumiyarti & Akhmad Fauzan Imamy, mengadakan penelitian tentang “Analisis Pengaruh Perimbangan Pusat-Daerah Terhadap Perekonomian Kota Depok”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh ketergantungan fiskal pusat-daerah yang tercermin dari dana perimbangan terhadap kemajuan ekonomi dan juga bagaimana pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah dan Tenaga Kerja sebagai cerminan dari sumber daya yang dimiliki oleh daerah terhadap kemajuan ekonomi daerah kota Depok. Metode yang digunakan adalah metode *Ordinary Least Square (OLS)* dengan melakukan estimasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DP), dan Tenaga Kerja (TK) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Depok. Pengamatan dilakukan secara kuartalan 2000 : 1 – 2003 : 4.

Penggunaan metode ini melibatkan dua variabel yaitu variabel bebas (PDRB) dan variabel terikat (PAD, DP, TK). Hubungan fungsional antara variabel bebas dengan variabel terikat dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\text{PDRB} = f(\text{PAD}, \text{DP}, \text{TK}) \dots \dots \dots (1)$$

Data-data yang digunakan tersebut dinyatakan dalam bentuk log linier (ln).

Dengan demikian spesifikasi model yang digunakan untuk melakukan estimasi adalah sebagai berikut:

$$\text{LPDRBt} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{LPADt} + \alpha_2 \text{LDPt} + \alpha_3 \text{LTKt} + \text{et} \dots \dots \dots (2)$$

Dimana:	
LPDRBt	= Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan.
LPADt	= Pendapatan Asli Daerah Kota Depok yang tercatat dalam laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok (APBD).
LDPt	= Dana Perimbangan yang tercatat dalam laporan realisasi penerimaan Dana Perimbangan Kota Depok.
LTKt	= Tenaga Kerja yaitu jumlah Tenaga Kerja dari jumlah angkatan kerja Kota Depok berusia 10 tahun ke atas yang bekerja.
α_0	= Konstanta
$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$	= Parameter yang diestimasi, merupakan persentase perubahan variabel dependent yang disebabkan oleh perubahan masing-masing variabel independent sebesar 1 persen.
et	= <i>Disturbance error</i>

Hasil analisis menunjukkan : (1) Variabel PAD tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembentukan PDRB Kota Depok. Hasil pengujian ini tidak sesuai dengan hipotesis bahwa variabel PAD diduga berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB Kota Depok. Kecilnya kontribusi PAD dalam penerimaan APBD telah menyebabkan pengaruh variabel PAD terhadap PDRB menjadi tidak berarti; (2) Variabel Dana Perimbangan mempengaruhi PDRB Kota Depok secara positif dan signifikan. Hasil pengujian ini sesuai dengan hipotesis bahwa semakin tinggi tingkat Penerimaan Dana Perimbangan, maka semakin

meningkat PDRB Kota Depok.; (3) Tenaga kerja mempengaruhi PDRB Kota Depok secara positif dan signifikan. Hasil pengujian ini sesuai dengan hipotesis bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja akan meningkatkan kegiatan ekonomi Kota Depok; (4) Dari koefisien determinasi ($Adj R^2$) sebesar 0,969415 menerangkan bahwa kemampuan variabel PAD, DP, dan TK dalam menjelaskan PDRB Kota Depok sebesar 96,9415 %, sedangkan sisanya sebesar 3,0585 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.



BAB IV

LANDASAN TEORI

4.1. Teori Kebijakan Fiskal

4.1.1. Desentralisasi Sebagai Suatu Konsep

Desentralisasi dapat diartikan sebagai suatu pendelegasian tanggung jawab atau penyerahan kekuasaan dan wewenang. Mengenai desentralisasi fiskal ada beberapa pendapat yang berbeda dalam melaksanakan fungsi, tanggung jawab dan penyediaan sumber keuangan daerah.

Pendapat pertama, menyatakan bahwa kemampuan daerah dalam melaksanakan fungsinya tergantung pada kemampuan daerah dalam menggali sumber penerimaan yang independen, seperti dana yang berasal dari pajak dan retribusi, karena semakin besar menggali sumber penerimaannya akan memperkecil pengawasan pusat.

Pendapat kedua, menyatakan bahwa hubungan ketergantungan daerah atas dana dari pusat dengan keleluasaan daerah atas pengeluaran-pengeluaran daerah adalah tidak langsung. Pemerintah daerah harus mempunyai sumber pendapatan yang elastis, tidak tergantung dari asal dana tersebut dan memiliki keleluasaan terutama dalam menggunakan dana tersebut. Desentralisasi mengenai kewenangan pemerintahan menyangkut berbagai aspek misalnya bidang politik, urusan pemerintahan, sosial dan pembangunan ekonomi dan aspek fiskal (Ananda, 2002).

Dengan demikian ada beberapa konsep seperti:

- a. *Administrative decentralization*
- b. *Political decentralization*
- c. *Economic or market decentralization*
- d. *Fiscal decentralization*

Desentralisasi administratif adalah pelimpahan sebagian wewenang dan pertanggung jawaban dibarengi dengan pemberian wewenang untuk mengelola sumber-sumber keuangan untuk membiayai kegiatan operasional dan penyediaan pelayanan publik (*public service*). Pelimpahan wewenang tersebut berkaitan dengan fungsi-fungsi manajemen urusan pemerintahan dan bidang keuangan (*financial management*) dari pemerintah pusat kepada pemerintahan di daerah (*local government*). Dalam sistem desentralisasi administratif yang terjadi di Indonesia terdapat tiga bentuk yaitu ;

1. Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada kantor-kantor departemen yang ada di daerah artinya pelaksanaan kegiatan yang menjadi urusan departemen di suatu daerah
2. Desentralisasi atau Otonomi, yaitu pelimpahan wewenang yang lebih luas dari departemen kepada pemerintah lokal dan didukung dengan dana. Jadi secara tegas ada tugas kegiatan dan biayanya (*budget*).
3. Bantuan (*medebewind*), yaitu pelaksanaan urusan atau kegiatan tertentu oleh daerah yang memperoleh pelimpahan wewenang dan pembiayaan dari pusat, namun *decision* terakhir berada pada pihak pemberi wewenang.

4.1.2. Kebijakan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan, desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan (UU No. 33 Pasal 1).

Definisi tersebut menunjukkan wewenang Pemda dalam mengelola keuangan dan anggaran daerahnya yang disebut dengan kebijakan Desentralisasi Fiskal. Kebijakan tersebut banyak dipergunakan di Negara-negara Sedang Berkembang untuk menghindari ketidak-efektifan dan ketidak-efisienan pemerintahan, ketidakstabilan ekonomi makro, dan ketidakcukupan pertumbuhan ekonomi (Bahl dan Linn, 1992).

4.1.3. Derajat Otonomi Fiskal Daerah

Derajat otonomi fiskal daerah merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan daerah dalam usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Derajat otonomi fiskal daerah ini diukur dengan menggunakan rasio antara pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin besar derajat otonomi fiskal daerah maka akan semakin besar kemampuan daerah untuk melakukan otonomi.

Berlakunya UU otonomi daerah No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara

pemerintah pusat-daerah, maka pemerintah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mendapatkan sumber-sumber pembiayaan dan pendapatan dalam rangka meningkatkan derajat otonomi fiskal daerahnya. Sehingga, semakin tinggi derajat otonomi fiskal suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

4.1.4. Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan daerah merupakan tatanan keseluruhan atas perangkat kelembagaan dan kebijakan anggaran daerah yang meliputi pendapatan dan pembelanjaan daerah (APBD). Anggaran merupakan suatu alat perencanaan mengenai pengeluaran dan penerimaan (atau pendapatan) di masa yang akan datang, umumnya disusun untuk satu tahun. Disamping itu anggaran merupakan alat kontrol atau pengawasan terhadap baik pengeluaran maupun pendapatan di masa yang akan datang (Suparmoko, 2002 : 26).

Sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, berbagai kebijaksanaan keuangan daerah yang diambil, diarahkan agar pemerintah daerah dapat semakin meningkatkan kemampuannya dalam membiayai urusan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunannya, keuangan daerah terdiri dari:

4.1.4.1. Penerimaan Daerah

Daerah sebagai badan hukum mempunyai otonomi dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dimana daerah membutuhkan sumber-

sumber pendapatan sebagai kekayaan untuk membiayai pembangunan daerah. Dalam usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah tersebut, diupayakan dengan berbagai cara, yaitu dengan berpedoman pada peraturan dan Undang-Undang yang berlaku. Adapun sumber penerimaan daerah dapat dilihat pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan. Pendapatan daerah yang dimaksud bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan; dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sedangkan Penerimaan Pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah; penerimaan pinjaman daerah; dana cadangan daerah; dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (Undang-Undang otonomi daerah tahun 2004).

4.1.4.2. Pengeluaran Daerah

Daerah yang telah memiliki wewenang penuh dan sebagai badan hukum mempunyai otonomi dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dimana daerah membutuhkan sumber-sumber pendapatan sebagai kekayaan untuk membiayai pembangunannya daerahnya. Dalam hal ini pengeluaran daerah terdiri dari :

1. Belanja Daerah

a) Belanja Aparatur Daerah

Merupakan bagian belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/pembangunan yang dialokasikan pada

atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik).

Belanja aparatur daerah ini dapat dirinci menurut enam jenis yaitu :

- Belanja Pegawai
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Perjalanan Dinas
- Biaya Pemeliharaan
- Belanja Lain-lain
- Belanja Modal

b) Belanja Pelayanan Publik

Adalah bagian belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/pembangunan yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik).

Belanja pelayanan publik ini dapat dirinci menjadi delapan jenis, yaitu:

- Belanja Pegawai
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Perjalanan Dinas
- Biaya Pemeliharaan
- Belanja Lain-lain
- Belanja Modal
- Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
- Pengeluaran Tidak Tersangka
(BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Kab/Kota Propinsi Riau)

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Adalah pengeluaran pembiayaan daerah yang bersumber dari transfer ke dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran utang pokok yang jatuh tempo, dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.

4.2. Hubungan Antar Variabel

Variabel input yang terdiri dari komponen penerimaan berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan pengeluaran daerah berupa Belanja Rutin serta Belanja Modal, bahwa DAU mempunyai peran yang sangat penting dalam menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal daerah kabupaten/kota di Propinsi Riau khususnya Riau Daratan. Tujuannya membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat. Sehingga transfer dana dari pemerintah pusat ini dapat di alokasikan untuk membiayai pengeluaran belanja rutin dan belanja modal.

Komponen variabel output yang terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana dua komponen ini mempunyai peranan penting bagi perekonomian dan kapasitas fiskal daerah, khususnya di Riau Daratan.

4.3. Efisiensi

4.3.1. Pengertian Efisiensi

Efisiensi adalah perbandingan output terhadap input, atau jumlah output per unit input (jumlah output/unit input). Dalam banyak pusat pertanggungjawaban, efisiensi diukur dengan cara membandingkan biaya-biaya aktual dengan standar dimana biaya-biaya tersebut harus diukur dengan output yang terukur.

Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan. Suatu aktivitas dapat dikatakan efisien apabila dapat memperoleh hasil yang sama dengan aktivitas lain tetapi sumber daya yang digunakan lebih sedikit.

Tingkat efisiensi diukur dengan indikator yang dihitung dari rasio antara nilai tambah (*value added*) dengan nilai output. Ini berarti semakin tinggi nilai rasio tersebut semakin tinggi tingkat efisiensinya, karena semakin rendah biaya input yang diperlukan untuk menghasilkan suatu unit output. Dalam istilah umum, efisiensi sering diartikan sebagai : dengan biaya sekecil-kecilnya diharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang sebesar-besarnya.

Menurut Pareto dan Koopmans (1950) sebuah organisasi atau perusahaan dikatakan efisiensi bila dapat hasilkan lebih banyak output dengan sejumlah input yang sama atau dengan menurunkan penggunaan input dapat dihasilkan output yang sama. Konsep dan pengertian efisiensi diatas kemudian diperluas oleh Farel (1957), Kopp(1981), Koop & Diewart (1982) yang mencoba menganalisis bagaimana respon antara perencanaan produksi dengan nilai input

serta nilai output itu sendiri dipasar. Bisa jadi kita dapat hasilkan output yang sama dengan menggunakan input yang sedikit, akan tetapi output yang kita hasilkan ternyata lebih mahal harganya dipasar dibanding output yang sama dihasilkan pesaing. Permasalahan mahalnya harga jual produk padahal dengan komposisi input yang semakin berkurang dapat disebabkan diantaranya; penurunan penggunaan input karena keterpaksaan, disebabkan harga input yang semakin mahal (Rustam, 2005 : 175).

Secara umum ada dua komponen pengukuran efisiensi :

1. *Technical Efficiency* atau efisiensi teknis

Efisiensi ini mencoba mengukur tingkat penggunaan dari sarana Ekonomi/sejumlah input untuk menghasilkan sejumlah output tertentu.

2. *Allocative Efficiency* atau efisiensi alokatif

Mengukur sampai sejauh mana kombinasi optimal dari ragam input yang digunakan dalam proses produksi pada tingkat harga relatif.

4.3.2. Efisiensi Pengeluaran Pemerintah Daerah

Efisiensi dalam pengeluaran belanja pemerintah daerah didefinisikan sebagai suatu kondisi ketika tidak mungkin lagi realokasi sumber daya yang dilakukan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, efisiensi pengeluaran belanja pemerintah daerah diartikan ketika setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah daerah menghasilkan kesejahteraan masyarakat yang paling optimal. Ketika kondisi tersebut terpenuhi, maka

dikatakan pengeluaran pemerintah telah mencapai tingkat yang efisien (Kurnia, 2005 : 4).

Dalam kaitannya dengan pengeluaran belanja pemerintah daerah, ada tiga jenis efisiensi yang penting untuk dilihat yaitu (Kurnia, 2005 : 5) :

a. Efisiensi Produksi

Efisiensi produksi adalah efisiensi menyangkut biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan output tertentu. Dalam kaitannya dengan desentralisasi fiskal. Efisiensi produksi bisa dicapai karena sumber daya yang ada dialokasikan diantara berbagai pengeluaran yang dihasilkan output yang paling maksimal. Pengukuran dan perbandingan relatif efisiensi produksi ini bisa dilakukan secara langsung dengan kategori-kategori tertentu yang akan dilihat misalnya, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan lain-lain.

b. Efisiensi Alokasi.

Efisiensi alokasi adalah efisiensi yang menyangkut kesesuaian pengeluaran belanja dengan preferensi masyarakat. Dalam kaitannya dengan desentralisasi fiskal, efisiensi alokasi bisa karena sumber daya yang ada dialokasikan diantara berbagai jenis pengeluaran belanja yang sesuai dengan preferensi masyarakat daerah. Pengukuran efisiensi alokasi ini tidak bisa dilakukan secara langsung karena ukuran preferensi marginal masyarakat sulit untuk diketahui.

c. Efisiensi Fiskal

Efisiensi Fiskal adalah efisiensi yang menyangkut sumber penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran belanja pemerintah daerah.

Secara umum sumber penerimaan pemerintah daerah berasal dari dua komponen utama, yaitu : Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan (transfer dari pemerintah pusat). Efisiensi fiskal dalam kaitannya dengan sumber penerimaan ini menyangkut tiga hal : (1) apakah pajak dan retribusi daerah yang dipungut merupakan pajak yang tepat dalam artian bahwa pajak dan retribusi daerah yang dipungut dari objek pajak tertentu langsung terkait dengan target-target pengeluaran tertentu pula? (2) Dana perimbangan (transfer pemerintah pusat) seharusnya ditujukan untuk penyesuaian-penyesuaian karena adanya eksternalitas tanpa mengganggu kepentingan pemerintah daerah, (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seharusnya tidak menyebabkan tekanan dan dampak negatif terhadap stabilitas makroekonomi regional.

BAB V

METODE PENELITIAN

5.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dipusatkan di Propinsi Riau khususnya Riau Daratan. Peneliti memilih daerah ini sebagai objek penelitian karena dilihat propinsi ini memperoleh proporsi dana alokasi yang kurang dari pemerintah pusat. Hal ini merupakan permasalahan yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak dalam rangka penerapan dan pelaksanaan otonomi daerah.

5.2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis data sekunder. Pendekatan kepustakaan dilakukan dengan cara mengambil teori-teori umum dari berbagai literatur maupun studi empiris untuk mendapatkan landasan teori yang mendukung penelitian.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data-data yang telah dikumpulkan dan diterbitkan oleh lembaga atau organisasi tertentu untuk masyarakat pengguna data. Penelitian ini menggunakan data 11 Kabupaten/Kota di Propinsi Riau Daratan pada tahun 2003 dan 2004. Data tersebut berupa laporan penerimaan dan pengeluaran pembangunan daerah dalam APBD kabupaten/kota di Propinsi Riau.

Data dan informasi tersebut diperoleh dari:

- Badan Pusat Statistik Propinsi Riau
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah (*www.Djpkpd.go.id*)
- Komite Pelaksanaan dan Pengawas Otonomi Daerah (*www.KPPOD.go.id*)

5.3. Definisi Variabel

Penelitian ini menggunakan dua komponen yang diamati, yakni struktur penerimaan dan struktur belanja. Variabel terpilih didasarkan pada besarnya peranan terhadap kapasitas fiskal daerah dan kedekatan hubungan antar variabel. Artinya, variabel input dianggap sangat erat kaitannya dengan pencapaian variabel output.

Variabel yang dikategorikan sebagai variabel input adalah:

- a) Dana Alokasi Umum (DAU) yang sering disebut dengan *General Purpose Grant*. Variabel ini digunakan sebagai indikator penerimaan di daerah yang mempunyai kontribusi penting dalam pembangunan. Dana alokasi umum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup Kabupaten/Kota di Propinsi Riau khususnya Riau Daratan periode 2003 – 2004.
- b) Belanja Rutin, sebagai alokasi anggaran terbesar di daerah yang juga digunakan sebagai proksi terhadap penggunaan sumber daya manusia di daerah. Penggunaan dana belanja rutin kabupaten/kota didasarkan pada periode 2003 – 2004 di Propinsi Riau khususnya Riau Daratan.

- c) **Belanja Modal/Pembangunan**, sebagai proksi terhadap perhatian pemerintah terhadap keberadaan infrastruktur. Pengeluaran untuk sektor ini dapat dikategorikan sebagai belanja pembangunan terbesar daerah. Pengambilan data belanja modal ini didasarkan pada pengeluaran belanja pelayanan publik kabupaten/kota di Propinsi Riau khususnya Riau Daratan periode 2003 – 2004.

Selanjutnya, disusun pula dua variabel output yakni pajak dan retribusi daerah. Variabel ini dijadikan variabel output mengingat pentingnya peranan kedua penerimaan ini pada perekonomian dan kapasitas fiskal daerah (Sebayang, 2005:208).

- a) **Pajak**, merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ditetapkan melalui peraturan daerah. Pungutan ini dikenakan pada semua objek pajak seperti orang/badan, benda bergerak/tak bergerak.
- b) **Retribusi Daerah**, merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran / pemakaian karena memperoleh jasa yang diberikan oleh daerah atau dengan kata lain retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan secara langsung dan nyata. Retribusi daerah terdiri dari pelayanan kesehatan, pengujian kendaraan bermotor penggantian biaya cetak peta, pengujian kapal perikanan, pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir dan atau pertokoan, penjualan produksi daerah, ijin peruntukan penggunaan tanah, ijin trayek dan lain-lain.

5.4. Hubungan Antar Variabel

Variabel input yang terdiri dari komponen penerimaan berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan pengeluaran daerah berupa Belanja Rutin serta Belanja Modal, bahwa DAU mempunyai peran yang sangat penting dalam menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal daerah kabupaten/kota di Propinsi Riau khususnya Riau Daratan. Tujuannya membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat. Sehingga transfer dana dari pemerintah pusat ini dapat di alokasikan untuk membiayai pengeluaran belanja rutin dan belanja modal.

Komponen variabel output yang terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana dua komponen ini mempunyai peranan penting bagi perekonomian dan kapasitas fiskal daerah, khususnya di Riau Daratan.

5.5. Metode Analisis Data

Guna mencapai tujuan penelitian maka dalam penelitian ini menggunakan pendekatan non parametrik *Data Envelopment Analysis* (DEA) dengan menggunakan data 11 kabupaten/kota di Propinsi Riau khususnya Riau Daratan periode 2003 – 2004. Analisis ini dimaksudkan untuk pengukuran efisiensi suatu organisasi atau unit kegiatan ekonomi (UKE) yang melibatkan banyak input dan banyak output (*multi-input multi-output*).

5.5.1. Konsep Dasar *Data Envelopment Analysis* (DEA)

DEA merupakan prosedur yang dirancang secara khusus untuk mengukur efisiensi relatif suatu unit kegiatan ekonomi (UKE) yang menggunakan banyak input dan banyak output, dimana penggabungan input dan output tersebut tidak mungkin dilakukan. Efisiensi relatif suatu UKE adalah efisiensi suatu UKE dibanding dengan UKE lain dalam sampel (sekelompok UKE yang saling diperbandingkan) yang menggunakan jenis input dan output yang sama.

Efisiensi relatif UKE didefinisikan sebagai rasio dari total output tertimbang dibagi total input tertimbangnya (*total weighted output/ total weighted input*). Inti dari DEA adalah menentukan bobot (*weights*) atau timbangan untuk setiap input dan output UKE. Bobot tersebut memiliki sifat; (1) tidak bernilai negatif, dan (2) bersifat universal, artinya setiap UKE dalam sampel harus dapat menggunakan seperangkat bobot yang sama untuk mengevaluasi rasionya (*total weighted output/total weighted input*) dan rasio tersebut tidak boleh lebih dari 1 (*total weighted output/total weighted input ≤ 1*) atau 100%.

DEA berasumsi bahwa setiap UKE akan memilih bobot yang memaksimalkan rasio efisiensinya (*maximize total weighted output/total weighted input*). Karena setiap UKE menggunakan kombinasi input yang berbeda untuk menghasilkan kombinasi output yang berbeda pula, maka setiap UKE akan memilih seperangkat bobot yang mencerminkan keragaman tersebut. Secara umum UKE akan menetapkan bobot yang tinggi untuk input yang penggunaannya sedikit dan untuk output yang diproduksi dengan banyak.

Bobot-bobot tersebut bukan merupakan nilai ekonomis dari input dan outputnya, melainkan sebagai penentu untuk memaksimalkan efisiensi dari suatu UKE.

5.5.2. Formulasi DEA

Penggunaan teknik linear programming sangat perlu digunakan dalam analisis DEA. Adalah kita akan membandingkan efisiensi dari sejumlah UKE, misalkan n . Setiap UKE menggunakan m jenis input untuk menghasilkan s jenis output. Sebagai contoh, $X_{ij} > 0$ merupakan jumlah input i yang digunakan oleh UKE j ; dan $Y_{rj} > 0$ merupakan jumlah output r yang dihasilkan oleh UKE j . Variabel keputusan dari kasus tersebut adalah bobot yang harus diberikan pada setiap input dan output oleh UKE k .

Misal v_{ik} adalah bobot yang diberikan pada input i oleh UKE k , dan u_{rk} adalah bobot yang diberikan pada output r oleh UKE k . Sehingga v_{ik} dan u_{rk} merupakan variabel keputusan, yaitu variabel yang nilainya akan ditentukan melalui literasi program linear. Diformulasikan sejumlah n program linear fraksional, satu formulasi program linear untuk setiap UKE di dalam sampel. Fungsi tujuan dari setiap program linear fraksional tersebut adalah rasio dari output tertimbang total dari UKE k dibagi dengan input tertimbang totalnya.

Formulasi fungsi tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

$$\text{Maksimumkan } Z_k = \frac{\sum_{r=1}^s u_{rk} \cdot Y_{rk}}{\sum_{i=1}^m v_{ik} \cdot X_{ik}}$$

Kriteria universalitas mensyaratkan DMU k untuk memilih bobot dengan batasan/kendala bahwa tidak ada UKE lain yang akan memiliki efisiensi lebih besar dari 1 atau 100% jika UKE lain tersebut menggunakan bobot yang dipilih oleh UKE k .

Sehingga formulasi selanjutnya adalah :

$$\frac{\sum_{r=1}^s u_{rk} \cdot Y_{rj}}{\sum_{i=1}^m v_{ik} \cdot X_{ij}} \leq 1; j = 1, \dots, n$$

Bobot yang dipilih tidak boleh bernilai negatif :

$$u_{rk} \geq 0; r = 1, \dots, s$$

$$v_{ik} \geq 0; i = 1, \dots, m$$

Transformasi program linear, yang kita sebut dengan DEA (*Data Envelopment Analysis*), sebagai berikut :

$$(DEA) \text{ Maksimumkan } Z_k = \sum_{r=1}^s u_{rk} \cdot Y_{rk}$$

Dengan batasan/kendala :

$$[p_{kj}] \quad \sum_{r=1}^s u_{rk} \cdot Y_{rj} - \sum_{i=1}^m v_{ik} \cdot X_{ij} \leq 0; j = 1, \dots, n$$

$$[q_k] \quad \sum_{i=1}^m v_{ik} \cdot X_{ik} = 1$$

$$u_{rk} \geq 0; r = 1, \dots, s$$

$$v_{ik} \geq 0; i = 1, \dots, m$$

5.5.3. Nilai Manajerial DEA

Data Envelopment Analysis (DEA) memiliki beberapa nilai manajerial :

1. DEA menghasilkan efisiensi untuk setiap UKE, relatif terhadap UKE yang lain di dalam sampel. Angka efisiensi ini memungkinkan seorang analis untuk mengenali UKE yang paling membutuhkan perhatian dan merencanakan tindakan perbaikan bagi UKE yang tidak/ kurang efisien.
2. Jika suatu UKE kurang efisien (efisien $< 100\%$), DEA menunjukkan sejumlah UKE yang memiliki efisiensi sempurna (*efficient reference set*, efisiensi = 100 %) dan seperangkat angka pengganda (*multipliers*) yang dapat digunakan oleh manajer untuk menyusun strategi perbaikan. Informasi tersebut memungkinkan seorang analis membuat UKE hipotesis yang menggunakan input yang lebih sedikit dan menghasilkan output paling tidak sama atau lebih banyak dibanding UKE yang tidak efisien, sehingga UKE hipotesis tersebut akan memiliki efisiensi yang sempurna jika menggunakan bobot input dan bobot output dari UKE yang tidak efisien. Pendekatan tersebut memberi arah strategis bagi manajer untuk meningkatkan efisiensi suatu UKE yang tidak efisien melalui pengenalan terhadap input yang terlalu banyak digunakan serta output produksinya terlalu rendah. Sehingga seorang manajer tidak hanya mengetahui UKE yang tidak efisien, tetapi ia juga mengetahui seberapa besar tingkat input dan output harus disesuaikan agar dapat memiliki efisiensi yang tinggi.
3. DEA menyediakan matriks efisiensi silang. Efisiensi silang UKE A terhadap UKE B merupakan rasio dari output tertimbang dibagi input tertimbang

yang dihitung dengan menggunakan tingkat input dan output UKE A dan bobot input dan output UKE B. Analisis efisiensi silang dapat membantu seorang manajer untuk mengenali UKE yang efisien tetapi menggunakan kombinasi input dan menghasilkan kombinasi output yang sangat berbeda dengan UKE lain. UKE tersebut sering disebut sebagai *maverick* (menyimpang, unik).

5.5.4. Keterbatasan DEA

Meskipun untuk menghitung efisiensi relatif memiliki banyak kelebihan dibanding analisis rasio parsial dan analisis regresi, DEA memiliki beberapa keterbatasan.

- 1) DEA mensyaratkan semua input dan output harus spesifik dan dapat diukur (demikian pula untuk analisis rasio dan regresi). Kesalahan dalam memasukkan input dan output yang valid akan memberikan hasil yang bias. Kesalahan tersebut dapat mengakibatkan UKE yang pada kenyataannya tidak efisien menjadi nampak efisien, ataupun sebaliknya. Seperti halnya pada metode pengukuran efisiensi lainnya, DEA harus disusun dengan benar.
- 2) DEA berasumsi bahwa setiap unit input atau output identik dengan unit lain dalam tipe yang sama.
- 3) Dalam bentuk dasarnya DEA berasumsi adanya *constan return to scale* (CRTS). CRTS menyatakan bahwa perubahan proposional pada semua tingkat input akan menghasilkan perubahan proposional yang sama pada

tingkat output. Ini merupakan asumsi yang penting, sebab asumsi ini memungkinkan semua UKE diukur dan dibandingkan terhadap unit *isoquant*, walaupun pada kenyataannya hal tersebut tidak selalu (jarang) terjadi.

- 4) Bobot input dan bobot output yang dihasilkan oleh DEA tidak dapat ditafsirkan dalam nilai ekonomi, meskipun koefisien tersebut memiliki formulasi matematik yang sama. Tetapi hal ini bukan merupakan kendala yang serius, sebab DEA bertujuan mengukur efisiensi teknis relatif.



BAB VI

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

6.1. Deskripsi Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk pencatatan dari Biro Pusat Statistik yaitu Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Riau, khususnya Riau Daratan periode 2003 – 2004.

Variabel data yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. *Data Input*

- Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksud untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat. Variabel ini digunakan sebagai indikator penerimaan di daerah yang mempunyai kontribusi penting dalam pembangunan. Dana alokasi umum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup Kabupaten/Kota di Propinsi Riau khususnya Riau Daratan periode 2003 – 2004.
- Belanja Rutin merupakan bagian belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/pembangunan yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat

(publik), dan juga sebagai alokasi anggaran terbesar di daerah yang digunakan sebagai proksi terhadap penggunaan sumber daya manusia di daerah. Penggunaan dana belanja rutin kabupaten/kota didasarkan pada periode 2003 – 2004 di Propinsi Riau khususnya Riau Daratan.

- Belanja Modal/Pembangunan adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah aset) yang terdiri dari belanja modal tanah; belanja modal jalan dan jembatan; belanja modal bangunan air (irigasi); belanja modal instalasi; belanja modal jaringan; belanja modal bangunan gedung; belanja modal monumen; belanja modal alat-alat besar; belanja modal alat-alat angkutan; belanja modal alat-alat bengkel; belanja modal alat-alat pertanian; belanja modal alat-alat kantor dan rumah tangga; belanja modal alat-alat studio; belanja modal alat-alat komunikasi; belanja modal alat-alat kedokteran; belanja modal alat-alat laboratorium; belanja modal buku/perpustakaan; belanja modal barang bercorak kesenian dan kebudayaan; belanja modal hewan, ternak serta tanaman; dan belanja modal alat-alat persenjataan/keamanan. Pengeluaran untuk sektor ini dapat dikategorikan sebagai belanja pembangunan terbesar daerah. Pengambilan data belanja modal ini didasarkan pada pengeluaran belanja pelayanan publik kabupaten/kota di Propinsi Riau khususnya Riau Daratan periode 2003 – 2004.

2. *Data Output*

- Pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ditetapkan

melalui peraturan daerah. Pungutan ini dikenakan pada semua objek pajak seperti orang/badan, benda bergerak/tak bergerak yang ada di Kabupaten/Kota Propinsi Riau khususnya Riau Daratan periode 2003 – 2004.

- **Retribusi Daerah** merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran / pemakaian karena memperoleh jasa yang diberikan oleh daerah atau dengan kata lain retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan secara langsung dan nyata. Retribusi daerah terdiri dari pelayanan kesehatan, pengujian kendaraan bermotor penggantian biaya cetak peta, pengujian kapal perikanan, pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir dan atau pertokoan, penjualan produksi daerah, ijin peruntukan penggunaan tanah, ijin trayek dan lain-lain. Data yang digunakan adalah data retribusi daerah kabupaten/kota di Propinsi Riau khususnya Riau Daratan tahun 2003 – 2004.

6.2. Analisa data

Pengukuran efisiensi kebijakan fiskal daerah di Propinsi Riau khususnya Riau Daratan dilakukan dengan menggunakan metode non parametrik *Data Envelopment Analysis* (DEA). Penggunaan alat analisis ini karena DEA memiliki keunggulan dari alat analisis lainnya, seperti Analisis Rasio dan Regresi. Adapun keunggulannya meliputi : (1) DEA dapat menggunakan banyak input dan banyak output, (2) DEA menghasilkan efisiensi untuk setiap Unit Kegiatan Ekonomi

(UKE) relatif terhadap UKE didalam sampel. Angka efisiensi ini memungkinkan seorang analis untuk mengenali UKE yang paling membutuhkan perhatian dan merencanakan tindakan perbaikan bagi unit kegiatan ekonomi yang tidak/kurang efisien, (3) DEA menunjukkan sejumlah UKE yang memiliki efisiensi sempurna (*efficient reference set*, efisiensi = 100%) dan seperangkat angka pengganda (*multipliers*) yang dapat digunakan oleh manajer untuk menyusun strategi perbaikan.

6.2.1. Tingkat Efisiensi

Hasil empiris pengukuran tingkat efisiensi kebijakan fiskal daerah di kabupaten/kota Riau Daratan tahun 2003 -2004 menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.1
Tingkat Efisiensi Kebijakan Fiskal Daerah
Kabupaten/Kota di Riau Daratan Tahun 2003-2004

Kabupaten/Kota	Efisiensi (%)	
	2003	2004
Kab. Kuantan Singingi	55,80	59,68
Kab. Indragiri Hulu	21,85	15,92
Kab. Indragiri Hilir	73,01	81,02
Kab. Pelalawan	25,37	11,63
Kab. Siak	100,00	62,18
Kab. Kampar	35,46	34,32
Kab. Rokan Hulu	30,37	27,08
Kab. Bengkalis	38,06	14,84
Kab. Rokan Hilir	38,58	19,83
Kota Pekanbaru	100,00	100,00
Kota Dumai	37,30	28,94

Sumber : BPS, diolah

Tabel 6.1 menunjukkan besarnya efisiensi kebijakan fiskal daerah yang beragam di 11 kabupaten/kota di propinsi Riau Daratan pada tahun 2003 dan

2004. Di tahun 2003 terdapat dua kabupaten/kota yang tingkat efisiensinya sempurna (100%) yaitu kabupaten Siak dan kota Pekanbaru. Ini menunjukkan bahwa kedua kabupaten/kota tersebut mampu memanfaatkan sumber daya keuangan daerah dengan optimal. Sedangkan di tahun 2004 hanya kota Pekanbaru yang mampu mempertahankan secara optimal (100%) dalam memanfaatkan sumber daya keuangan daerahnya. Besarnya efisiensi pada tahun 2003 dan 2004 berfluktuasi, hal ini terlihat di tahun 2004 kabupaten Siak tingkat efisiensinya menurun hingga 62,18%. Perubahan efisiensi kebijakan fiskal ini dikarenakan sumber daya pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Siak pada tahun 2004 mengalami penurunan. Terlebih pada retribusi daerah yang mengalami penurunan yang cukup tajam, dari Rp 15,43 milyar pada tahun 2003 turun menjadi Rp 1,86 milyar pada tahun 2004. Hal ini dikarenakan penyelewengan dana retribusi daerah yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga uang pungutan retribusi yang seharusnya masuk ke kas daerah, malah masuk ke kantong para oknum-oknum tertentu. Sehingga kabupaten ini mengalami penurunan efisiensi kebijakan fiskal daerahnya.

Tingkat efisiensi kebijakan fiskal daerah di kabupaten/kota lainnya masih cenderung belum efisien. Di tahun 2003 hanya kabupaten Kuantan Singingi (55,80%) dan kabupaten Indragiri Hilir (73,01%) yang tingkat efisiensinya diatas 50%. Bukan berarti kedua kabupaten tersebut dapat dikategorikan sebagai wilayah yang mampu memanfaatkan sumber daya keuangan daerah dengan optimal karena tingkat efisiensinya belum sempurna. Di tahun 2004 kabupaten

Kuantan Singingi (59,68%), kabupaten Siak (62,18%), dan kabupaten Indragiri Hilir (81,02%) saja yang tingkat efisiensinya diatas 50%. Sedangkan kabupaten/kota lainnya yang memiliki tingkat efisiensi kebijakan fiskal daerah di wilayah masing-masing cenderung di bawah 50% pada tahun 2003 dan 2004.

Secara garis besar, daerah kabupaten/kota yang mengalami inefisiensi di Propinsi Riau khususnya Riau Daratan harus memperhatikan sumber penerimaan dan pengeluarannya. Hal ini mengingat angka ketidakefisienan kebijakan fiskal daerahnya yang cenderung naik turun selama periode pengamatan (kecuali Kabupaten Siak tahun 2003 dan Kota Pekanbaru tahun 2003 dan 2004). Maka dari itu, peran pemerintah daerah kabupaten/kota di Propinsi Riau khususnya Riau Daratan harus memperhatikan regulasi kebijakan yang tepat bagi daerahnya agar mencapai efisiensi sempurna 100%.

6.2.2. Sumber Inefisiensi dan Cara Mengatasinya

Pengolahan data dengan menggunakan program DEA, dapat menunjukkan ketidakefisienan suatu unit kegiatan ekonomi, sekaligus dapat merekomendasikan bagaimana cara meningkatkan tingkat efisiensinya. Untuk meningkatkan tingkat efisiensi dengan angka 100%, dapat diketahui input mana saja yang belum efisien penggunaannya dan output mana saja yang harus ditingkatkan. Yang dimaksud dengan efisien adalah menghasilkan nilai output yang maksimum dengan sejumlah input tertentu, atau dengan input minimum dapat menghasilkan output tertentu.

6.2.2.1. Sumber Inefisiensi

Tabel 6.2
Sumber Inefisiensi Dominan* pada Kebijakan Fiskal Daerah
Kabupaten/Kota di Riau Daratan

Kabupaten/Kota	Sumber Inefisiensi	
	2003	2004
Kab. Kuantan Singingi	DAU, BRUTIN, BMODAL, PAJAK	DAU, BRUTIN, BMODAL, PAJAK
Kab. Indragiri Hulu	DAU, BRUTIN, BMODAL, PAJAK	DAU, BRUTIN, BMODAL, PAJAK
Kab. Indragiri Hilir	DAU, BRUTIN, BMODAL, PAJAK	DAU, BRUTIN, BMODAL, PAJAK
Kab. Pelalawan	DAU, BRUTIN, BMODAL, RETRIBUSI	DAU, BRUTIN, BMODAL, PAJAK
Kab. Siak	—	DAU, BRUTIN, BMODAL, RETRIBUSI
Kab. Kampar	DAU, BRUTIN, BMODAL, PAJAK	DAU, BRUTIN, BMODAL, PAJAK
Kab. Rokan Hulu	DAU, BRUTIN, BMODAL, PAJAK	DAU, BRUTIN, BMODAL, PAJAK
Kab. Bengkalis	DAU, BRUTIN, BMODAL, RETRIBUSI	DAU, BRUTIN, BMODAL, RETRIBUSI
Kab. Rokan Hilir	DAU, BRUTIN, BMODAL, RETRIBUSI	DAU, BRUTIN, BMODAL, RETRIBUSI
Kota Pekanbaru	—	—
Kota Dumai	DAU, BRUTIN, BMODAL, PAJAK	DAU, BRUTIN, BMODAL, PAJAK

Sumber : Statistik Keuangan Kabupaten/Kota, diolah

Catatan * : diasumsikan bahwa inefisiensi sebagai pemanfaatan sumber daya kurang dari 100 persen.

DAU : Dana Alokasi Umum
BRUTIN : Belanja Rutin Daerah
BMODAL : Belanja Modal Daerah
PAJAK : Penerimaan Pajak Daerah
RETRIBUSI : Penerimaan Retribusi Daerah

Tabel 6.2 menunjukkan sumber inefisiensi yang beragam dari kabupaten/kota (kecuali Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak tahun 2003) di Propinsi Riau khususnya Riau Daratan. Hal ini dapat dilihat dari kabupaten/kota yang inefisien pada variabel input, namun banyak juga yang inefisien pada variabel output. Masing-masing daerah kadangkala membentuk pola inefisien tersendiri, bahkan ada kecenderungan munculnya pola yang

sama selama dua periode yang diamati. Misalnya, kabupaten Pelalawan pada variabel input membentuk pola yang sama di tahun 2003 dan 2004, tetapi pada variabel output mengalami perbedaan inefisiensi. Ini dapat dilihat dari inefisiensi variabel output retribusi di tahun 2003 dan variabel output pajak di tahun 2004. Perbedaan ini diakibatkan karena pemerintah daerah kabupaten Pelalawan belum bisa memanfaatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah di wilayahnya.

6.2.2.2. Mengatasi Inefisiensi dengan Angka Pengganda (*Multiplier*)

Hasil empiris dengan pengolahan DEA didapat tabel *peer units*. Tabel ini memperlihatkan nilai aktual dari input yang digunakan maupun juga nilai aktual dari output yang dihasilkan dibanding dengan beberapa kabupaten/kota yang tingkat efisiensinya 100%. Pada tabel *peer units* ini juga terdapat nilai multiplier dari masing-masing kabupaten/kota pembanding untuk masing-masing kabupaten/kota. Nilai multiplier ini bermanfaat bagi pengambil keputusan beberapa input yang seharusnya digunakan dengan membandingkan pada beberapa kabupaten/kota yang efisien untuk menghasilkan sejumlah output.

Tabel 6.3
Efisiensi, Acuan Efisiensi dan Angka Pengganda
Pada 11 Kabupaten/Kota di Riau Daratan

Kabupaten/Kota	Efficiency		Efficient Reference Set		Multipliers	
	2003	2004	2003	2004	2003	2004
Kab. Kuntan Singingi	55,80%	59,68%	Kota Pekanbaru	Kota Pekanbaru	0,120	0,102
Kab. Indragiri Hulu	21,85%	15,92%	Kota Pekanbaru	Kota Pekanbaru	0,120	0,089
Kab. Indragiri Hilir	73,01%	81,02%	Kota Pekanbaru	Kota Pekanbaru	0,489	0,455
Kab. Pelalawan	25,37%	11,63%	Kota Pekanbaru	Kota Pekanbaru	0,103	0,057
Kab. Siak	100%	62,18%	Tidak ada	Kota Pekanbaru	Tidak ada	0,374
Kab. Kampar	35,46%	34,32%	Kota Pekanbaru	Kota Pekanbaru	0,228	0,174
Kab. Rokan Hulu	30,73%	27,08%	Kota Pekanbaru	Kota Pekanbaru	0,100	0,075
Kab. Bengkalis	38,06%	14,84%	Kota Pekanbaru	Kota Pekanbaru	0,350	0,186
Kab. Rokan Hilir	38,58%	19,83%	Kota Pekanbaru	Kota Pekanbaru	0,236	0,111
Kota Pekanbaru	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Kota Dumai	37,30%	28,94%	Kota Pekanbaru	Kota Pekanbaru	0,202	0,143

Sumber : BPS, diolah

Hasil empiris diatas terlihat hanya Kota Pekanbaru yang tingkat efisiensinya sempurna pada dua periode (2003-2004). Sehingga Kota Pekanbaru menjadi kota pembanding untuk kabupaten/kota lainnya yang belum efisien (kecuali Kabupaten Siak pada tahun 2003).

Tingkat efisiensi yang dicapai oleh Kabupaten Indragiri Hulu hanya sebesar 21,85%. Untuk meningkatkan efisiensi pada Kabupaten Indragiri Hulu adalah dengan mengacu pada *efficient reference set*, yaitu dengan menggunakan angka pengganda dari Kota Pekanbaru yang menjadi acuan efisiensi. Dengan angka pengganda tersebut dapat menentukan tingkat output dan input untuk Kabupaten Indragiri Hulu agar menjadi lebih efisien. Agar menjadi efisien, maka Kabupaten Indragiri Hulu harus menghasil output dan menggunakan input sebesar 0,120 kali output dan input Kota Pekanbaru.

Tabel 6.4
Rincian Perhitungan Efisiensi Input dengan Acuan Efisiensi dan
Angka Pengganda Pada Kabupaten/Kota di Riau Daratan
Tahun 2003 (Milyar Rupiah)

Kabupaten/Kota	Input	Acuan Efisiensi (Kota Pekanbaru)	Jumlah
Kab. Indragiri Hulu	DAU	= 0,120 x 161,8	= 19,4
	BRUTIN	= 0,120 x 252,3	= 30,3
	BMODAL	= 0,120 x 67,4	= 8,1
Kab. Pelalawan	DAU	= 0,103 x 161,8	= 16,6
	BRUTIN	= 0,103 x 252,3	= 25,9
	BMODAL	= 0,103 x 67,4	= 6,9
Kab. Rokan Hulu	DAU	= 0,100 x 161,8	= 16,2
	BRUTIN	= 0,100 x 252,3	= 25,2
	BMODAL	= 0,100 x 67,4	= 6,7
Kab. Kampar	DAU	= 0,228 x 161,8	= 36,9
	BRUTIN	= 0,228 x 252,3	= 57,5
	BMODAL	= 0,228 x 67,4	= 15,4
Kota Dumai	DAU	= 0,202 x 161,8	= 32,7
	BRUTIN	= 0,202 x 252,3	= 51,1
	BMODAL	= 0,202 x 67,4	= 13,6
Kab. Bengkalis	DAU	= 0,350 x 161,8	= 56,6
	BRUTIN	= 0,350 x 252,3	= 88,2
	BMODAL	= 0,350 x 67,4	= 23,6
Kab. Rokan Hilir	DAU	= 0,236 x 161,8	= 38,2
	BRUTIN	= 0,236 x 252,3	= 59,6
	BMODAL	= 0,236 x 67,4	= 15,9
Kab. Kuantan Singingi	DAU	= 0,120 x 161,8	= 19,4
	BRUTIN	= 0,120 x 252,3	= 30,3
	BMODAL	= 0,120 x 67,4	= 8,1
Kab. Indragiri Hilir	DAU	= 0,489 x 161,8	= 79,1
	BRUTIN	= 0,489 x 252,3	= 123,3
	BMODAL	= 0,489 x 67,4	= 32,9

Sumber : Hasil olah DEA tahun 2003 dengan pembulatan

Keterangan :

DAU : Dana Alokasi Umum
BRUTIN : Belanja Rutin
BMODAL : Belanja Modal

Tabel 6.4 menunjukkan rincian perhitungan input untuk mencapai efisiensi sempurna 100% dari kabupaten/kota yang belum efisien. Kabupaten Indragiri Hulu contohnya, dapat memiliki efisiensi 100% jika mampu menggunakan DAU sebesar Rp 19,4 milyar, belanja rutin sebesar Rp 30,3 milyar dan belanja modal sebesar Rp 8,1 milyar. Sehingga selama ini, Kabupaten Indragiri Hulu banyak menggunakan DAU sebesar Rp 130,7 milyar – Rp 19,4 milyar = Rp 111,3 milyar, dan terlalu banyak menggunakan belanja rutin sebesar

Rp 138,7 milyar – Rp 30,3 milyar = Rp 108,4 milyar serta belanja modal sebesar Rp 135,4 milyar – Rp 8,1 milyar = Rp 127,3 milyar.

Begitu juga dengan kabupaten/kota lainnya yang belum efisien, harus mengacu kepada Kota Pekanbaru sebagai kota pembanding dengan angka pengganda (*multiplier*) pada masing-masing daerah.

Tabel 6.5
Rincian Perhitungan Efisiensi Output dengan Acuan Efisiensi dan
Angka Pengganda Pada Kabupaten/Kota di Riau Daratan
Tahun 2003 (Milyar Rupiah)

Kabupaten/Kota	Output	Acuan Efisiensi (Kota Pekanbaru)	Jumlah
Kab. Indragiri Hulu	Pajak	= 0,120 x 30,1	= 3,6
	Retribusi	= 0,120 x 22,7	= 2,7
Kab. Pelalawan	Pajak	= 0,103 x 30,1	= 3,1
	Retribusi	= 0,103 x 22,7	= 2,3
Kab. Rokan Hulu	Pajak	= 0,100 x 30,1	= 3,0
	Retribusi	= 0,100 x 22,7	= 2,3
Kab. Kampar	Pajak	= 0,228 x 30,1	= 6,9
	Retribusi	= 0,228 x 22,7	= 5,2
Kota Dumai	Pajak	= 0,202 x 30,1	= 6,1
	Retribusi	= 0,202 x 22,7	= 4,6
Kab. Bengkalis	Pajak	= 0,350 x 30,1	= 10,5
	Retribusi	= 0,350 x 22,7	= 7,9
Kab. Rokan Hilir	Pajak	= 0,236 x 30,1	= 7,1
	Retribusi	= 0,236 x 22,7	= 5,4
Kab. Kuantan Singingi	Pajak	= 0,120 x 30,1	= 3,6
	Retribusi	= 0,120 x 22,7	= 2,7
Kab. Indragiri Hilir	Pajak	= 0,489 x 30,1	= 14,7
	Retribusi	= 0,489 x 22,7	= 11,1

Sumber : Hasil olah DEA tahun 2003 dengan pembulatan

Rincian perhitungan output pada tabel 6.5 menunjukkan bahwa kabupaten/kota di Riau Daratan dapat mencapai efisiensi sempurna 100% dengan acuan Kota Pekanbaru sebagai *efficient reference set*. Agar mencapai efisiensi sempurna 100%, maka Kabupaten Indragiri Hulu harus mampu menghasilkan pajak daerah sebesar Rp 3,6 milyar dan retribusi daerah sebesar Rp 2,7 milyar.

Hal yang sama juga harus dilakukan oleh kabupaten/kota di Riau Daratan lainnya agar tingkat efisiensinya mencapai 100%, harus mengacu pada Kota Pekanbaru sebagai *efficient reference set* (kota pembanding).

Tabel 6.6
Rincian Perhitungan Efisiensi Input dengan Acuan Efisiensi dan
Angka Pengganda Pada Kabupaten/Kota di Riau Daratan
Tahun 2004 (Milyar Rupiah)

Kabupaten/Kota	Input	Acuan Efisiensi (Kota Pekanbaru)	Jumlah
Kab. Pelalawan	DAU	= 0,057 x 164,7	= 9,4
	BRUTIN	= 0,057 x 283,0	= 16,2
	BMODAL	= 0,057 x 68,6	= 3,9
Kab. Bengkalis	DAU	= 0,186 x 164,7	= 30,7
	BRUTIN	= 0,186 x 283,0	= 52,7
	BMODAL	= 0,186 x 68,6	= 12,8
Kab. Indragiri Hulu	DAU	= 0,089 x 164,7	= 14,7
	BRUTIN	= 0,089 x 283,0	= 25,3
	BMODAL	= 0,089 x 68,6	= 6,1
Kab. Rokan Hilir	DAU	= 0,111 x 164,7	= 18,2
	BRUTIN	= 0,111 x 283,0	= 31,3
	BMODAL	= 0,111 x 68,6	= 7,6
Kab. Rokan Hulu	DAU	= 0,075 x 164,7	= 12,4
	BRUTIN	= 0,075 x 283,0	= 21,2
	BMODAL	= 0,075 x 68,6	= 5,2
Kota Dumai	DAU	= 0,143 x 164,7	= 23,6
	BRUTIN	= 0,143 x 283,0	= 40,6
	BMODAL	= 0,143 x 68,6	= 9,8
Kab. Kampar	DAU	= 0,174 x 164,7	= 28,7
	BRUTIN	= 0,174 x 283,0	= 49,2
	BMODAL	= 0,174 x 68,6	= 11,9
Kab. Kuantan Singingi	DAU	= 0,102 x 164,7	= 16,8
	BRUTIN	= 0,102 x 283,0	= 28,9
	BMODAL	= 0,102 x 68,6	= 7,0
Kab. Siak	DAU	= 0,374 x 164,7	= 61,6
	BRUTIN	= 0,374 x 283,0	= 105,9
	BMODAL	= 0,374 x 68,6	= 25,7
Kab. Indragiri Hilir	DAU	= 0,455 x 164,7	= 75,0
	BRUTIN	= 0,455 x 283,0	= 128,8
	BMODAL	= 0,455 x 68,6	= 31,2

Sumber : Hasil olah DEA tahun 2004 dengan pembulatan

Keterangan :

DAU : Dana Alokasi Umum
BRUTIN : Belanja Rutin
BMODAL : Belanja Modal

Tingkat efisiensi pada tahun 2004 di kabupaten/kota Riau Daratan cenderung lebih rendah dari tahun sebelumnya (2003), Kabupaten Pelalawan contohnya (tabel 6.6) dengan tingkat efisiensi hanya sebesar 11,63%. Agar

mencapai efisiensi sebesar 100%, maka kabupaten tersebut harus mampu menggunakan DAU sebesar Rp 9,4 milyar, dana belanja rutin sebesar Rp 16,2 milyar dan belanja modal sebesar Rp 3,9 milyar. Sehingga selama ini, Kabupaten Pelalawan banyak menggunakan DAU sebesar Rp 109,0 milyar – Rp 9,4 milyar = Rp 99,6 milyar, dan terlalu banyak menggunakan belanja rutin sebesar Rp 139,3 milyar – Rp 16,2 milyar = Rp 123,1 milyar serta belanja modal sebesar Rp 143,2 milyar – Rp 3,9 milyar = Rp 139,3 milyar.

Begitu juga dengan kabupaten/kota lainnya yang belum efisien, harus mengacu kepada Kota Pekanbaru sebagai kota pembanding dengan angka pengganda (*multiplier*) pada masing-masing daerah.

Tabel 6.7
Rincian Perhitungan Efisiensi Output dengan Acuan Efisiensi dan
Angka Pengganda Pada Kabupaten/Kota di Riau Daratan
Tahun 2004 (Milyar Rupiah)

Kabupaten/Kota	Output	Acuan Efisiensi (Kota Pekanbaru)	Jumlah
Kab. Pelalawan	Pajak	= 0,492 x 30,1	= 14,8
	Retribusi	= 0,492 x 30,9	= 15,2
Kab. Bengkalis	Pajak	= 1,255 x 30,1	= 37,8
	Retribusi	= 1,255 x 30,9	= 38,8
Kab. Indragiri Hulu	Pajak	= 0,561 x 30,1	= 16,9
	Retribusi	= 0,561 x 30,9	= 17,3
Kab. Rokan Hilir	Pajak	= 0,557 x 30,1	= 16,8
	Retribusi	= 0,557 x 30,9	= 17,2
Kab. Rokan Hulu	Pajak	= 0,277 x 30,1	= 8,3
	Retribusi	= 0,277 x 30,9	= 8,6
Kota Dumai	Pajak	= 0,495 x 30,1	= 14,9
	Retribusi	= 0,495 x 30,9	= 15,3
Kab. Kampar	Pajak	= 0,507 x 30,1	= 15,3
	Retribusi	= 0,507 x 30,9	= 15,7
Kab. Kuantan Singingi	Pajak	= 0,171 x 30,1	= 5,2
	Retribusi	= 0,171 x 30,9	= 5,3
Kab. Siak	Pajak	= 0,602 x 30,1	= 18,1
	Retribusi	= 0,602 x 30,9	= 18,6
Kab. Indragiri Hilir	Pajak	= 0,562 x 30,1	= 16,9
	Retribusi	= 0,562 x 30,9	= 17,4

Sumber : Hasil olah DEA tahun 2004 dengan pembulatan

Berdasarkan rincian perhitungan tabel 6.7, Kabupaten Pelalawan memiliki efisiensi 100% jika mampu menghasilkan pajak daerah sebesar Rp 14,8 milyar dan retribusi daerah sebesar Rp 15,2 milyar. Sehingga selama ini, Kabupaten Pelalawan belum mampu mengoptimalkan sumber penerimaan daerahnya yang dikarenakan penyelewengan dana pajak dan retribusi daerah oleh oknum-oknum tertentu, padahal potensi dari dua sumber pemasukan ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian Kabupaten Pelalawan.

Kabupaten Siak mengalami inefisiensi pada tahun 2004, hal ini sangat jauh berbeda dari tahun sebelumnya yang mencapai efisiensi sempurna 100%. Penurunan efisiensi ini tidak jauh berbeda alasannya dengan Kabupaten Pelalawan. Agar mencapai efisiensi sempurna kembali, Kabupaten Siak harus mengacu pada Kota Pekanbaru sebagai kota pembanding dan mampu menghasilkan pajak daerah sebesar Rp 18,1 milyar serta retribusi daerah sebesar Rp 18,6 milyar.

Hal yang sama juga harus dilakukan oleh kabupaten/kota di Riau Daratan lainnya agar tingkat efisiensinya mencapai 100%, harus mengacu pada Kota Pekanbaru sebagai *efficient reference set* (kota pembanding).

6.2.2.3. Mengatasi Inefisiensi dengan Meminimumkan Input

Agar tingkat efisiensi pada kabupaten/kota di Propinsi Riau khususnya Riau Daratan (kecuali Kabupaten Siak dan Kota Pekanbaru) meningkat maka penggunaan input pada kabupaten/kota tersebut harus mengacu pada kabupaten/kota yang telah efisien. Tabel 6.8 menunjukkan bagaimana solusi

meningkatkan efisiensi input pada kabupaten/kota yang belum efisien. Bila kabupaten/kota itu efisien, pada kolom *achieved* menunjukkan angka 100%, dan pada kolom *to gain* (pengurangan) sebanyak 0 %. Karena jumlah dari kolom *achieved* dan *to gain* adalah 100%. Demikian pula untuk kolom *actual* dan *target*, nilainya harus sama.

Tabel 6.8
Aktual, Target dan Efisiensi yang Dicapai
Dengan Meminimumkan Input
di Kabupaten/Kota Riau Daratan 2003

Kab/Kota	Input	Aktual	Target	To Gain	Achieved
Kab. Indragiri Hulu	DAU	130,7	19,4	85,1%	14,9%
	BRUTIN	138,7	30,3	78,2%	21,8%
	BMODAL	135,4	8,1	94,0%	6,0%
Kab. Pelalawan	DAU	91,5	16,6	81,8%	18,2%
	BRUTIN	102,3	25,9	74,6%	25,4%
	BMODAL	168,5	6,9	95,9%	4,1%
Kab. Rokan Hulu	DAU	93,9	16,2	82,8%	17,2%
	BRUTIN	82,0	25,2	69,3%	30,7%
	BMODAL	86,8	6,7	92,2%	7,8%
Kab. Kampar	DAU	147,4	36,9	75,0%	25,0%
	BRUTIN	162,1	57,5	64,5%	35,5%
	BMODAL	322,9	15,4	95,2%	4,8%
Kota Dumai	DAU	99,1	32,7	67,0%	33,0%
	BRUTIN	136,9	51,1	62,7%	37,3%
	BMODAL	17,5	13,6	82,6%	17,4%
Kab. Bengkalis	DAU	148,6	56,6	61,9%	38,1%
	BRUTIN	333,3	88,2	73,5%	26,5%
	BMODAL	744,9	23,6	96,8%	3,2%
Kab. Rokan Hilir	DAU	99,1	38,2	61,4%	38,6%
	BRUTIN	255,0	59,6	76,6%	23,4%
	BMODAL	430,3	15,9	96,3%	3,7%
Kab. Kuantan Singingi	DAU	126,5	19,4	84,6%	15,4%
	BRUTIN	54,3	30,3	44,2%	55,8%
	BMODAL	126,4	8,1	93,6%	6,4%
Kab. Indragiri Hilir	DAU	185,9	79,1	57,5%	42,5%
	BRUTIN	168,9	123,3	27,0%	73,0%
	BMODAL	173,0	32,9	81,0%	19,0%
Kab. Siak	DAU	101,3	101,3	0,0%	100%
	BRUTIN	320,0	320,0	0,0%	100%
	BMODAL	377,0	377,0	0,0%	100%
Kota Pekanbaru	DAU	161,8	161,8	0,0%	100%
	BRUTIN	252,3	252,3	0,0%	100%
	BMODAL	67,4	67,4	0,0%	100%

Sumber : BPS, diolah

Catatan :

DAU : Dana Alokasi Umum
BRUTIN : Belanja Rutin Daerah
BMODAL : Belanja Modal Daerah

Berdasarkan tabel 6.8 dapat dilihat besarnya efisiensi yang dicapai sumber daya keuangan kabupaten/kota di Propinsi Riau khususnya Riau Daratan tahun 2003 rata-rata belum efisien, dominan tingkat efisiensinya pada kolom *achieved* dibawah 50%. Pada Kabupaten Indragiri Hulu, tingkat efisiensi sumber daya DAUnya 14,9%, artinya agar menjadi efisien maka pemanfaatan sumber daya DAU harus dikurangi sebanyak 85,1%. Tampak pada kolom aktual dan kolom target menunjukkan angka yang berbeda, dimana nilai pada kolom aktual secara nominal lebih besar daripada nilai target. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu melakukan pemborosan dalam pemanfaatan sumber daya Dana Alokasi Umum (DAU). Dari tiga input yang digunakan, yang paling tidak efisien adalah penggunaan belanja modal yakni hanya mencapai 6,0%, sehingga untuk mencapai efisien penggunaan belanja modal harus dikurangi sebanyak 94,0%. Penggunaan pengeluaran belanja rutinpun menunjukkan tingkat efisiensi yang relatif rendah, yakni hanya mencapai 21,8%, untuk itu penggunaan biaya belanja rutin harus dikurangi sebanyak 78,2% agar mencapai efisien.

Berbeda dengan kabupaten lainnya, Kabupaten Siak mengalami efisiensi yang sempurna (100%) pada variabel input yang digunakan. Hal ini dapat dilihat dari pemanfaatan sumber daya DAU pada kolom *achieved* yang mencapai angka 100%, sehingga pada kolom *to gain* (pengurangan) hanya menunjukkan angka 0,0%. Sehingga pada masing-masing kolom aktual dan kolom target menunjukkan angka yang sama, yakni sebesar 101,3. Hal yang serupa juga terjadi pada pengeluaran belanja rutin dan belanja modal yang

mencapai efisiensi sempurna 100%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal daerah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Siak sangatlah tepat dan efisien. Begitu pula dengan Kota Pekanbaru yang mengalami tingkat efisiensi sempurna 100% untuk pemanfaatan DAU, pengeluaran Belanja Rutin, dan penggunaan Belanja Modal.

Tabel 6.9
Aktual, Target dan Efisiensi yang Dicapai
Dengan Meminimumkan Input
di Kabupaten/Kota Riau Daratan 2004

Kab/Kota	Input	Aktual	Target	To Gain	Achieved
Kab. Indragiri Hulu	DAU	162,3	14,7	90,9%	9,1%
	BRUTIN	158,7	25,3	84,1%	15,9%
	BMODAL	143,0	6,1	95,7%	4,3%
Kab. Pelalawan	DAU	109,0	9,4	91,3%	8,7%
	BRUTIN	139,3	16,2	88,4%	11,6%
	BMODAL	143,2	3,9	97,3%	2,7%
Kab. Rokan Hulu	DAU	104,1	12,4	88,1%	11,9%
	BRUTIN	78,4	21,2	72,9%	27,1%
	BMODAL	49,0	5,2	89,5%	10,5%
Kab. Kampar	DAU	185,1	28,7	84,5%	15,5%
	BRUTIN	143,5	49,2	65,7%	34,3%
	BMODAL	166,7	11,9	92,8%	7,2%
Kota Dumai	DAU	97,8	23,6	75,9%	24,1%
	BRUTIN	140,1	40,6	71,1%	28,9%
	BMODAL	58,1	9,8	83,1%	16,9%
Kab. Bengkalis	DAU	206,7	30,7	85,2%	14,8%
	BRUTIN	366,6	52,7	85,6%	14,4%
	BMODAL	732,1	12,8	98,3%	1,7%
Kab. Rokan Hilir	DAU	91,8	18,2	80,2%	19,8%
	BRUTIN	315,5	31,3	90,1%	9,9%
	BMODAL	268,4	7,6	97,2%	2,8%
Kab. Kuantan Singingi	DAU	125,4	16,8	86,6%	13,4%
	BRUTIN	48,5	28,9	40,3%	59,7%
	BMODAL	110,1	7,0	93,6%	6,4%
Kab. Indragiri Hilir	DAU	203,8	75,0	63,2%	36,8%
	BRUTIN	159,0	128,8	19,0%	81,0%
	BMODAL	185,8	31,2	83,2%	16,8%
Kab. Siak	DAU	99,1	61,6	37,8%	62,2%
	BRUTIN	287,7	105,9	63,2%	36,8%
	BMODAL	356,6	25,7	92,8%	7,2%
Kota Pekanbaru	DAU	164,7	164,7	0,0%	100%
	BRUTIN	283,0	283,0	0,0%	100%
	BMODAL	68,6	68,6	0,0%	100%

Sumber : BPS, diolah

Catatan :

DAU : Dana Alokasi Umum
BRUTIN : Belanja Rutin Daerah
BMODAL : Belanja Modal Daerah

Tabel 6.9 menunjukkan tingkat efisiensi yang dicapai kabupaten/kota di Riau Daratan tahun 2004 yang belum efisien, dengan tingkat dominan efisiensinya dibawah 50%. Pada Kabupaten Indragiri Hilir efisiensi pada DAU yang dicapai hanya sebesar 36,8%, agar mencapai efisien (100%) maka pemerintah daerah harus mengurangi pengalokasian DAU sebesar 63,2%. Perbedaan nilai nominal antara aktual dengan target yang begitu besar berarti bahwa dalam pengalokasian terjadi pemborosan sehingga tidak efisien. Hal yang sama juga terjadi pada penggunaan dana belanja rutin yang hanya mencapai efisiensi 81,0%, agar mencapai efisien (100%) maka harus dikurangi sebesar 19,0%. Begitu juga dengan pengeluaran penggunaan dana belanja modal yang harus dikurangi sebesar 83,2% agar mencapai efisien sempurna.

Berbeda pada tahun sebelumnya, Kabupaten Siak pada tahun 2004 ini mengalami penurunan efisiensi pada Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Rutin, dan Belanja Modalnya. Tingkat efisiensi yang dicapai pada DAU hanya sebesar 62,2%; belanja rutin sebesar 36,8%; dan belanja modal sebesar 7,2%. Agar mencapai efisien pada tahun sebelumnya, penggunaan DAU harus dikurangi sebesar 37,8%. Begitu juga dengan belanja rutin dan belanja modal, masing-masing harus dikurangi sebesar 63,2% dan 92,8%.

Hal yang serupa juga harus dilakukan oleh setiap pemerintah daerah, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Kuantan Singingi untuk mencapai tingkat efisiensi 100%

harus melakukan pengurangan pada sumber daya pengalokasian dana DAU, dana pengeluaran belanja rutin serta penggunaan belanja modal daerahnya. Sedangkan Kota Pekanbaru mencapai efisiensi sempurna 100% pada pengalokasian dana DAU, dana pengeluaran Belanja Rutin dan penggunaan Belanja Modal.

6.2.2.4. Mengatasi Inefisiensi dengan Memaksimalkan Output

Mengatasi inefisiensi tidak hanya dapat dilakukan dengan meminimumkan input tetapi dapat juga dilakukan dengan memaksimalkan output. Dalam pembahasan ini, agar suatu unit kegiatan ekonomi (UKE) menjadi efisien (100%) maka dapat diselesaikan dengan meningkatkan outputnya dengan input tertentu.

Tabel 6.10 menunjukkan jumlah output yang harus dimaksimalkan pada tiap-tiap kabupaten/kota di Riau Daratan. Kabupaten/kota yang efisien penerimaan Pajak dan Retribusinya sempurna (100%) pada tahun 2003 hanya pada Kabupaten Siak dan Kota Pekanbaru. Ini berarti Kabupaten Siak dan Kota Pekanbaru mampu mengalokasikan pendapatannya dengan baik. Di Kabupaten Pelalawan, efisiensi yang dicapai pada pajak daerah sebesar 25,4% dan retribusi daerah sebesar 1,7%. Untuk mencapai efisiensi sempurna (100%) maka harus meningkatkan outputnya yaitu pada pajak daerah sebesar 294,2% dan retribusi daerah sebesar 830,6%. Sama halnya pada Kabupaten Bengkalis, efisiensi yang dicapai pada pajak daerahnya sebesar 38,1% dan efisiensi retribusi daerah yang dicapai sebesar 23,5%. Agar mencapai efisiensi

sempurna (100%) pemerintah Kabupaten Bengkalis harus meningkatkan pada pajak daerah sebesar 162,8% dan retribusi daerah sebesar 326,1%. Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hilir dan Kota Dumai, agar efisiensi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sempurna (100%) maka harus meningkatkan outputnya yang cukup tinggi nilainya.

Tabel 6.10
Aktual, Target dan Efisiensi yang Dicapai
Dengan Memaximumkan Output
di Kabupaten/Kota Riau Daratan 2003

Kab/Kota	Output	Aktual	Target	To Gain	Achieved
Kab. Indragiri Hulu	Pajak	1,2	16,6	1258,7%	7,4%
	Retribusi	2,7	12,5	357,8%	21,8%
Kab. Pelalawan	Pajak	3,1	12,2	294,2%	25,4%
	Retribusi	1,0	9,2	830,6%	1,7%
Kab. Rokan Hulu	Pajak	1,1	9,8	824,5%	10,8%
	Retribusi	2,3	7,4	225,5%	30,7%
Kab. Kampar	Pajak	3,8	19,4	403,3%	19,9%
	Retribusi	5,2	14,6	182,0%	35,5%
Kota Dumai	Pajak	3,2	16,4	404,8%	19,8%
	Retribusi	4,6	12,3	168,1%	37,3%
Kab. Bengkalis	Pajak	10,5	27,7	162,8%	38,1%
	Retribusi	4,9	20,9	326,1%	23,5%
Kab. Rokan Hilir	Pajak	7,1	18,5	159,2%	38,6%
	Retribusi	0,9	13,9	1518,0%	6,2%
Kab. Kuantan Singingi	Pajak	1,2	6,5	445,3%	18,3%
	Retribusi	2,7	4,9	79,2%	55,8%
Kab. Indragiri Hilir	Pajak	5,3	20,2	280,1%	26,3%
	Retribusi	11,1	15,2	37,0%	73,0%
Kab. Siak	Pajak	12,3	12,3	0,0%	100%
	Retribusi	15,4	15,4	0,0%	100%
Kota Pekanbaru	Pajak	30,1	30,1	0,0%	100%
	Retribusi	22,7	22,7	0,0%	100%

Sumber : BPS, diolah

Tahun 2004 efisiensi sumberdaya pajak daerah dan retribusi daerah sempurna (100%) masih dipegang oleh Kota Pekanbaru. Ini dapat dilihat pada tabel 6.11 yang menunjukkan besar angka nominal pada kolom aktual sama dengan kolom target. Berbeda dengan Kabupaten Pelalawan, kabupaten ini

mengalami penurunan efisiensi pada pajak daerahnya dari tahun 2003. Pada tahun 2004 efisiensi pajak daerah yang dicapai oleh kabupaten ini turun hingga 7,3%. Sedangkan retribusi daerah yang dicapai justru mengalami peningkatan hingga 11,6% pada tahun 2004 tetapi belum mencapai efisiensi sempurna. Penurunan efisiensi pada pajak daerah ini diakibatkan oleh pemerintah daerah yang kurang mampu mengoptimalkan sumber daya penerimaannya.

Tabel 6.11
Aktual, Target dan Efisiensi yang Dicapai
Dengan Memaximumkan Output
di Kabupaten/Kota Riau Daratan 2004

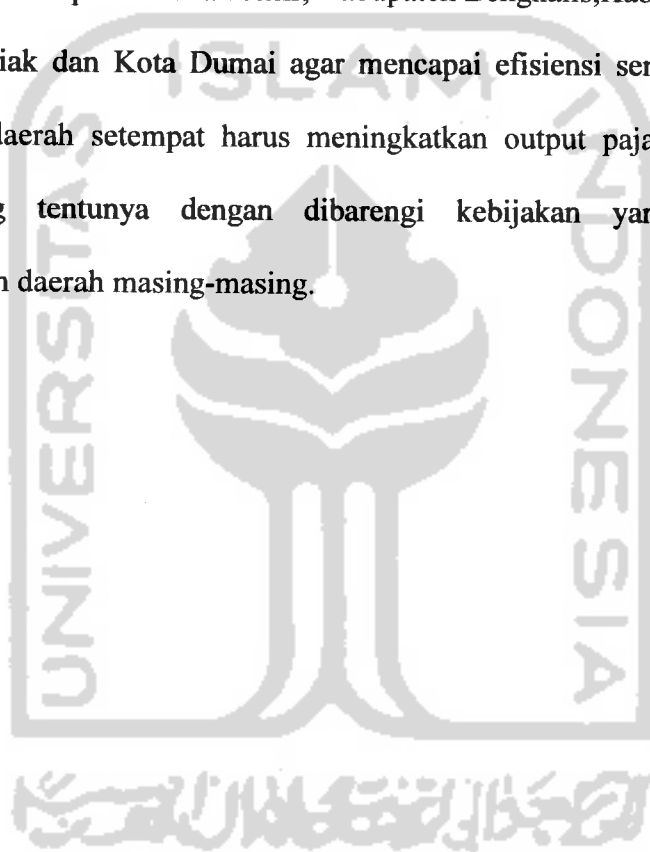
Kab/Kota	Output	Aktual	Target	To Gain	Achieved
Kab. Indragiri Hulu	Pajak	1,5	16,9	1018,6%	8,9%
	Retribusi	2,8	17,3	528,0%	15,9%
Kab. Pelalawan	Pajak	1,1	14,8	1260,8%	7,3%
	Retribusi	1,8	15,2	760,0%	11,6%
Kab. Rokan Hulu	Pajak	1,1	8,3	626,0%	13,8%
	Retribusi	2,3	8,6	269,3%	27,1%
Kab. Kampar	Pajak	3,8	15,3	296,8%	25,2%
	Retribusi	5,4	15,7	191,4%	34,3%
Kota Dumai	Pajak	3,3	14,9	348,0%	22,3%
	Retribusi	4,4	15,3	245,6%	28,9%
Kab. Bengkalis	Pajak	5,6	37,8	573,8%	14,8%
	Retribusi	5,3	38,8	634,7%	13,6%
Kab. Rokan Hilir	Pajak	3,3	16,8	404,4%	19,8%
	Retribusi	1,3	17,2	1215,8%	7,6%
Kab. Kuantan Singingi	Pajak	1,4	5,2	258,3%	27,9%
	Retribusi	3,2	5,3	67,6%	59,7%
Kab. Indragiri Hilir	Pajak	4,1	16,9	311,7%	24,3%
	Retribusi	14,1	17,4	23,4%	81,0%
Kab. Siak	Pajak	11,3	18,1	60,8%	62,2%
	Retribusi	1,9	18,6	900,0%	10,0%
Kota Pekanbaru	Pajak	30,1	30,1	0,0%	100%
	Retribusi	30,9	30,9	0,0%	100%

Sumber : BPS, diolah

Untuk mencapai efisiensi sempurna (100%), Kabupaten Pelalawan harus meningkatkan output pajak daerahnya serta retribusi daerah masing-masing sebesar 1260,8% dan 760,0%. Di Kabupaten Indragiri Hilir efisiensi yang dicapai pajak daerah adalah sebesar 24,3% dan efisiensi yang dicapai pada

retribusi daerah adalah sebesar 81,0%. Meskipun belum mencapai efisiensi sempurna 100%, Kabupaten Indragiri Hilir harus bisa meningkatkan pajak daerahnya sebesar 311,7% dan retribusi daerah sebesar 23,4% agar pengalokasian sumber daya tersebut optimal.

Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak dan Kota Dumai agar mencapai efisiensi sempurna (100%), pemerintah daerah setempat harus meningkatkan output pajak dan retribusi daerah yang tentunya dengan dibarengi kebijakan yang mendukung perekonomian daerah masing-masing.



BAB VII

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

7.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan program *Data Envelopment Analysis* (DEA) terhadap tingkat efisiensi kebijakan fiskal daerah pada 11 kabupaten/kota di Propinsi Riau khususnya Riau Daratan pada tahun 2003 dan 2004 adalah sebagai berikut :

1. Tingkat efisiensi kebijakan fiskal daerah di Propinsi Riau khususnya Riau Daratan pada tahun 2003 cenderung belum efisiensi sempurna (100%). Tingkat efisiensi sempurna 100% hanya dicapai oleh Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak, sedangkan untuk kabupaten/kota lainnya rata-rata tingkat efisiensinya di bawah 50%.
2. Tingkat efisiensi kebijakan fiskal daerah pada tahun 2004 di Propinsi Riau khususnya Riau Daratan menurun dari tahun sebelumnya (2003), tetapi hanya Kab. Kuantan Singingi yang mengalami peningkatan efisiensi dari 55,80% pada tahun 2003 meningkat menjadi 59,68% pada tahun 2004. Peningkatan juga terjadi pada Kab. Indragiri Hilir dari 73,01% pada tahun 2003 meningkat menjadi 81,02% pada tahun 2004. Sedangkan untuk kabupaten/kota lainnya tingkat efisiensi yang dicapai di bawah 50%, tetapi untuk Kab. Siak efisiensi kebijakan fiskal daerah yang dicapai turun drastis, yaitu sebesar 62,18% pada tahun 2004, berbeda pada tahun sebelumnya (2004) yang mencapai efisiensi sempurna 100%. Hal ini

dikarenakan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang turun pada tahun 2004.

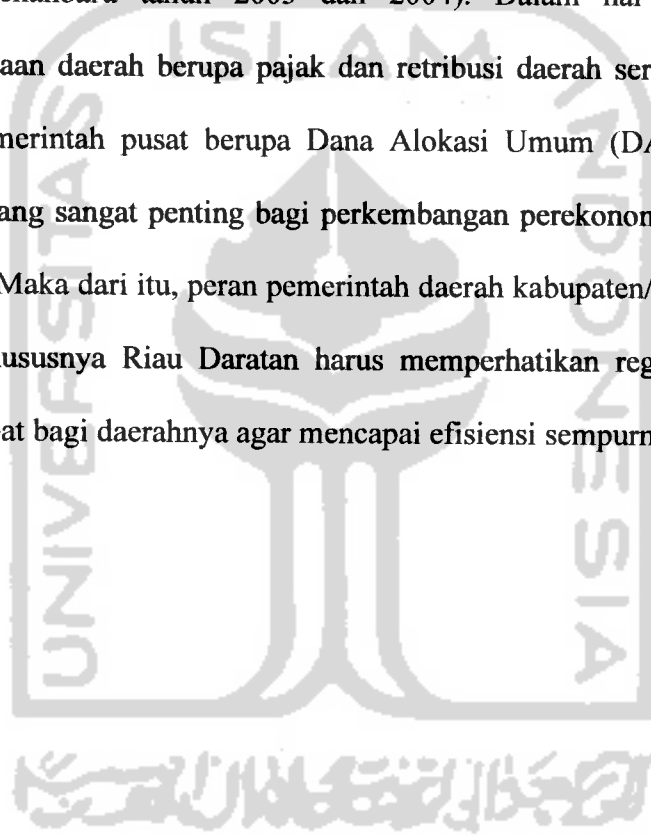
3. Dari 11 Kabupaten/Kota di Propinsi Riau khususnya Riau Daratan diantaranya masih terdapat inefisiensi kebijakan fiskal daerah, yaitu : Kab. Kuantan Singingi; Kab. Indragiri Hilir; Kab. Indragiri Hulu; Kab. Pelalawan; Kab. Kampar; Kab. Rokan Hulu; Kab. Bengkalis; Kab. Rokan Hilir; Kab. Siak dan Kota Dumai (kecuali Kab. Siak tahun 2003 dan Kota Pekanbaru tahun 2003 dan 2004).
4. Kabupaten/kota di Riau Daratan yang belum mencapai efisiensi sempurna 100%, dapat menjadikan Kota Pekanbaru sebagai *efficient reference set* (kota pembanding) untuk mengoptimalkan efisiensi daerahnya masing-masing.
5. Perkembangan perekonomian daerah kabupaten/kota di Riau Daratan sangat bervariasi setelah dilakukannya pengukuran efisiensi kebijakan fiskal. Kabupaten yang mengalami peningkatan efisiensi kebijakan fiskal daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir selama 2 periode pengamatan. Walaupun belum mencapai efisiensi sempurna 100%, pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir telah melakukan kebijakan penerimaan dan pengeluaran daerah dalam memanfaatkan sumber daya keuangannya.

7.2. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan yang di kemukakan di atas, implikasi kebijaksanaan berkaitan dengan hasil penelitian adalah :

1. Perlunya monitoring dan evaluasi yang terus-menerus terhadap penerimaan pemerintah daerah khususnya pada sektor pajak dan retribusi daerah, sehingga pendapatan pemerintah daerah dapat ditingkatkan. Karena penerimaan pendapatan pemerintah daerah yang tepat dapat meningkatkan tingkat efisiensi pada penerimaan tersebut.
2. Dalam rangka peningkatan efisiensi, dukungan pemerintah di masing-masing kabupaten/kota di Propinsi Riau khususnya Riau Daratan sangat dibutuhkan untuk menetapkan kebijakan yang tepat. Terutama dalam pengalokasian sumber daya keuangan untuk meningkatkan efisiensi kebijakan fiskal daerah.
3. Pentingnya perencanaan yang matang dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah di kabupaten/kota sehingga tidak terjadi penyalahgunaan dana yang akan sangat merugikan masyarakat di masing-masing daerah.
4. Untuk daerah yang belum efisien baik penerimaan maupun pengeluaran pemerintah, hendaknya dapat memperbaiki kinerja pemerintahannya. Hal ini dilakukan agar pengalokasian penerimaan dan pengeluaran pemerintah tersebut dapat terealisasikan dengan sempurna.

5. Secara garis besar, daerah kabupaten/kota yang mengalami inefisiensi di Propinsi Riau khususnya Riau Daratan harus memperhatikan sumber penerimaan dan pengeluarannya. Hal ini mengingat angka ketidakefisienan kebijakan fiskal daerahnya yang cenderung naik atau turun selama periode pengamatan (kecuali Kabupaten Siak tahun 2003 dan Kota Pekanbaru tahun 2003 dan 2004). Dalam hal ini, kontribusi penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi daerah serta transfer dana dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan perekonomian pemerintah daerah. Maka dari itu, peran pemerintah daerah kabupaten/kota di Propinsi Riau khususnya Riau Daratan harus memperhatikan regulasi kebijakan yang tepat bagi daerahnya agar mencapai efisiensi sempurna 100%.



DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, (1999), “*Modul Pelatihan Metodologi Penelitian Empiris Metode Kuantitatif Ekonomi dan Bisnis*”, Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi Universitas Gadjah Mada.
- _____ (2004), *Undang-Undang Otonomi Daerah Tahun 2004*, CV. Tamita Utama, Jakarta.
- Ananda, Candra Fajri, Prof. (2002), *Problems of The Implementation of Fiscal Decentralization in Regional Autonomy : The Case of Malang Manicipality and Trenggalek District*, Laporan Penelitian, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya, Malang.
- Bahl, Roy, and Linn, Johannes, (1992), *Urban Public Financer in Developing Countries*, New York: Oxford University Press.
- BPS (2003-2004), *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Riau*, BPS, Jakarta.
- _____ (2003), *Riau Dalam Angka*.
- Dina Pertiwi, Lela (2006), *Efisiensi Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan : Studi Kasus di Jawa Tengah Tahun 1999 dan 2002*, Skripsi Sarjana (Tidak dipublikasikan), Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Haris, Syamsuddin/editor (2005), “*Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintah Daerah*”, LIPI Press, Anggota IKAPI, Jakarta.
- Kartasasmita, Ginanjar (1996), “*Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*”, CIDES, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajat (2003), “*Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*”, Erlangga, Jakarta.
- Kurnawangsih, Tri (2002), “*Efisiensi Unit-Unit Kegiatan Ekonomi Industri Logam Dasar Non Besi dan Baja (ISIC 372) Indonesia Tahun 1996 dan 1998*”, *Media Ekonomi*, Vol. 8, No. 3, 299-313, LPFE, Jakarta.
- Kurniawan, Panca dan Agus Purwanto (2004), “*Pajak Daerah & Retribusi Daerah di Indonesia*”, Bayumedia, Malang.

- Kurnia, Akhmad Syakir (2006), "*Model Pengukuran Kinerja dan Efisiensi Sektor Publik Metode Free Disposable Hull (FDH)*", Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 11, No. 1, 1-20, Ekonisia FE UII, Yogyakarta.
- Rustam, Rinaldi (2005), "*Analisis Efisiensi Teknis Bank Devisa Nasional Dengan Menggunakan Metode Non Parametrik : Data Envelopment Analysis (DEA)*", Media Ekonomi, Vol 11, No. 2, 173-188, LPFE, Jakarta.
- Salam, Alfitra/pengantar (2005), "*Menimbang Kembali Kebijakan Otonomi daerah*", LIPI Press, Anggota IKAPI, Jakarta.
- Sebayang, Asnita Frida (2005), "*Kinerja Kebijakan Fiskal Daerah di Indonesia Pasca Krisis*", Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 10, No. 3, 203-214, Ekonisia FE UII, Yogyakarta.
- Sumiyarti & Akhmad Fauzan Imamy (2005), "*Analisis Pengaruh Perimbangan Pusat-Daerah Terhadap Perekonomian Kota Depok*", Media Ekonomi, Vol 11, No. 2, 113-128, LPFE, Jakarta.
- Suparmoko, M., Drs., Ph.D., MA. (2002), *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, Edisi Pertama, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Sriyana, Jaka (1999), "*Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, Reformasi Perpajakan dan Kemandirian Pembiayaan Pembangunan Daerah*", Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 4, No. 1, 102-113, Ekonisia FE UII, Yogyakarta.
- Tarigan, Antonius (2005), "*Urgensi Penguatan Keuangan Daerah, Suatu Tinjauan Terhadap Regulasi Daerah dan Implikasinya dalam Penyediaan Pelayanan Publik*", Perencanaan Pembangunan, Edisi 04/IX/Jul-Sept, BPFE, UGM, Yogyakarta.

**Lampiran I. Data Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Rutin, Belanja Modal,
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2003 - 2004**

Tahun 2003

Kabupaten/Kota	DAU	BRUTIN	BMODAL	PAJAK	RETRIBUSI
Kab.Kuantan singingi	126,54	54,30	126,39	1,19	2,73
Kab.Indragiri Hulu	130,66	138,71	135,38	1,22	2,73
Kab.Indragiri Hilir	185,89	168,89	173,05	5,31	11,11
Kab.Pelalawan	91,46	102,26	168,52	3,10	0,99
Kab.Siak	101,29	320,03	377,04	12,30	15,43
Kab.Kampar	147,42	162,13	322,92	3,85	5,18
Kab.Rokan Hulu	93,89	82,00	86,84	1,06	2,27
Kab.Bengkalis	148,63	333,31	744,88	10,54	4,90
Kab.Rokan Hilir	99,05	254,98	430,33	7,12	0,86
Kota Pekanbaru	161,80	252,29	67,40	30,15	22,73
Kota Dumai	99,14	136,87	78,50	3,24	4,60

Sumber: BPS, Statistik Keuangan Pemda Riau

Keterangan :

- DAU : Dana Alokasi Umum (Milyar Rp)
 Brutin : Belanja Rutin (Milyar Rp)
 Bmodal : Belanja Modal (Milyar Rp)
 Pajak : Pajak Daerah (Milyar Rp)
 Retribusi : Retribusi Daerah (Milyar Rp)

Tahun 2004

Kabupaten/Kota	DAU	BRUTIN	BMODAL	PAJAK	RETRIBUSI
Kab.Kuantan singingi	125,43	48,47	110,11	1,44	3,16
Kab.Indragiri Hulu	162,26	158,66	143,00	1,51	2,76
Kab.Indragiri Hilir	203,82	158,96	185,81	4,11	14,07
Kab.Pelalawan	109,00	139,33	143,22	1,09	1,77
Kab.Siak	99,11	287,69	356,64	11,27	1,86
Kab.Kampar	185,10	143,50	166,71	3,85	5,38
Kab.Rokan Hulu	104,14	78,43	49,04	1,15	2,32
Kab.Bengkalis	206,70	366,59	732,11	5,61	5,28
Kab.Rokan Hilir	91,84	315,45	268,36	3,33	1,31
Kota Pekanbaru	164,75	283,03	68,64	30,13	30,92
Kota Dumai	97,78	140,13	58,08	3,33	4,43

Sumber: BPS, Statistik Keuangan Pemda Riau

Keterangan :

- DAU : Dana Alokasi Umum (Milyar Rp)
 Brutin : Belanja Rutin (Milyar Rp)
 Bmodal : Belanja Modal (Milyar Rp)
 Pajak : Pajak Daerah (Milyar Rp)
 Retribusi : Retribusi Daerah (Milyar Rp)

Lampiran II. Tabel Efisiensi Tahun 2003

Table of efficiencies (radial)

21.85	KAB. INHU	25.37	KAB. PELALA	30.73	KAB. ROHUL
35.46	KAB. KAMPAR	37.30	KT. DUMAI	38.06	KAB. BENGKA
38.58	KAB. ROHIL	55.80	KAB. KUANTA	73.01	KAB. INHIL
100.00	KAB. SIAK	100.00	KT. PEKANBA		

Lampiran III. Tabel Peer dengan Meminimumkan Input Tahun 2003

Table of peer units

Peers for Unit KAB. INHU efficiency 21.85% radial

KAB. INHU	LAMBDA	KT. PEKANBA
ACTUAL		0.120
130.7 -DAU		19.4
138.7 -BRUTIN		30.3
135.4 -BMODAL		8.1
1.2 +PAJAK		3.6
2.7 +RETRIBUSI		2.7

Peers for Unit KAB. PELALAWAN efficiency 25.37% radial

KAB. PELALA	LAMBDA	KT. PEKANBA
ACTUAL		0.103
91.5 -DAU		16.6
102.3 -BRUTIN		25.9
168.5 -BMODAL		6.9
3.1 +PAJAK		3.1
1.0 +RETRIBUSI		2.3

Peers for Unit KAB. ROHUL efficiency 30.73% radial

KAB. ROHUL	LAMBDA	KT. PEKANBA
ACTUAL		0.100
93.9 -DAU		16.2
82.0 -BRUTIN		25.2
86.8 -BMODAL		6.7
1.1 +PAJAK		3.0
2.3 +RETRIBUSI		2.3

Peers for Unit KAB. KAMPAR efficiency 35.46% radial

KAB. KAMPAR	LAMBDA	KT. PEKANBA
ACTUAL		0.228
147.4 -DAU		36.9
162.1 -BRUTIN		57.5
322.9 -BMODAL		15.4
3.8 +PAJAK		6.9
5.2 +RETRIBUSI		5.2

Peers for Unit KT.DUMAI efficiency 37.30% radial

KT.DUMAI	LAMBDA	KT.PEKANBA
ACTUAL		0.202
99.1	-DAU	32.7
136.9	-BRUTIN	51.1
78.5	-BMODAL	13.6
3.2	+PAJAK	6.1
4.6	+RETRIBUSI	4.6

Peers for Unit KAB.BENGKALIS efficiency 38.06% radial

KAB.BENGKA	LAMBDA	KT.PEKANBA
ACTUAL		0.350
148.6	-DAU	56.6
333.3	-BRUTIN	88.2
744.9	-BMODAL	23.6
10.5	+PAJAK	10.5
4.9	+RETRIBUSI	7.9

Peers for Unit KAB.ROHIL efficiency 38.58% radial

KAB.ROHIL	LAMBDA	KT.PEKANBA
ACTUAL		0.236
99.1	-DAU	38.2
255.0	-BRUTIN	59.6
430.3	-BMODAL	15.9
7.1	+PAJAK	7.1
0.9	+RETRIBUSI	5.4

Peers for Unit KAB.KUANTANSING efficiency 55.80% radial

KAB.KUANTA	LAMBDA	KT.PEKANBA
ACTUAL		0.120
126.5	-DAU	19.4
54.3	-BRUTIN	30.3
126.4	-BMODAL	8.1
1.2	+PAJAK	3.6
2.7	+RETRIBUSI	2.7

Peers for Unit KAB.INHIL efficiency 73.01% radial

KAB.INHIL	LAMBDA	KT.PEKANBA
ACTUAL		0.489
185.9	-DAU	79.1
168.9	-BRUTIN	123.3
173.0	-BMODAL	32.9
5.3	+PAJAK	14.7
11.1	+RETRIBUSI	11.1

Peers for Unit KAB.SIAK efficiency 100.00% radial

KAB.SIAK	LAMBDA	KAB.SIAK
ACTUAL		1.000
101.3	-DAU	101.3
320.0	-BRUTIN	320.0
377.0	-BMODAL	377.0
12.3	+PAJAK	12.3
15.4	+RETRIBUSI	15.4

Peers for Unit KT.PEKANBARU efficiency 100.00% radial

KT.PEKANBA	LAMBDA	KT.PEKANBA
ACTUAL		1.000
161.8	-DAU	161.8
252.3	-BRUTIN	252.3
67.4	-BMODAL	67.4
30.1	+PAJAK	30.1
22.7	+RETRIBUSI	22.7

Lampiran IV. Tabel Target dengan Meminimumkan Input Tahun 2003

Table of target values

Targets for Unit KAB.INHU efficiency 21.85% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-DAU	130.7	19.4	85.1%	14.9%
-BRUTIN	138.7	30.3	78.2%	21.8%
-BMODAL	135.4	8.1	94.0%	6.0%
+PAJAK	1.2	3.6	196.8%	33.7%
+RETRIBUSI	2.7	2.7	0.0%	100.0%

Targets for Unit KAB.PELALAWAN efficiency 25.37% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-DAU	91.5	16.6	81.8%	18.2%
-BRUTIN	102.3	25.9	74.6%	25.4%
-BMODAL	168.5	6.9	95.9%	4.1%
+PAJAK	3.1	3.1	0.0%	100.0%
+RETRIBUSI	1.0	2.3	136.1%	42.4%

Targets for Unit KAB.ROHUL efficiency 30.73% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-DAU	93.9	16.2	82.8%	17.2%
-BRUTIN	82.0	25.2	69.3%	30.7%
-BMODAL	86.8	6.7	92.2%	7.8%
+PAJAK	1.1	3.0	184.1%	35.2%
+RETRIBUSI	2.3	2.3	0.0%	100.0%

Targets for Unit KAB.KAMPAR efficiency 35.46% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-DAU	147.4	36.9	75.0%	25.0%
-BRUTIN	162.1	57.5	64.5%	35.5%
-BMODAL	322.9	15.4	95.2%	4.8%
+PAJAK	3.8	6.9	78.5%	56.0%
+RETRIBUSI	5.2	5.2	0.0%	100.0%

Targets for Unit KT.DUMAI efficiency 37.30% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-DAU	99.1	32.7	67.0%	33.0%
-BRUTIN	136.9	51.1	62.7%	37.3%
-BMODAL	78.5	13.6	82.6%	17.4%
+PAJAK	3.2	6.1	88.3%	53.1%
+RETRIBUSI	4.6	4.6	0.0%	100.0%

Targets for Unit KAB.BENGKALIS efficiency 38.06% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-DAU	148.6	56.6	61.9%	38.1%
-BRUTIN	333.3	88.2	73.5%	26.5%
-BMODAL	744.9	23.6	96.8%	3.2%
+PAJAK	10.5	10.5	0.0%	100.0%
+RETRIBUSI	4.9	7.9	62.2%	61.7%

Targets for Unit KAB.ROHIL efficiency 38.58% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-DAU	99.1	38.2	61.4%	38.6%
-BRUTIN	255.0	59.6	76.6%	23.4%
-BMODAL	430.3	15.9	96.3%	3.7%
+PAJAK	7.1	7.1	0.0%	100.0%
+RETRIBUSI	0.9	5.4	524.2%	16.0%

Targets for Unit KAB.KUANTANSING efficiency 55.80% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-DAU	126.5	19.4	84.6%	15.4%
-BRUTIN	54.3	30.3	44.2%	55.8%
-BMODAL	126.4	8.1	93.6%	6.4%
+PAJAK	1.2	3.6	204.3%	32.9%
+RETRIBUSI	2.7	2.7	0.0%	100.0%

Targets for Unit KAB.INHIL efficiency 73.01% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-DAU	185.9	79.1	57.5%	42.5%
-BRUTIN	168.9	123.3	27.0%	73.0%
-BMODAL	173.0	32.9	81.0%	19.0%
+PAJAK	5.3	14.7	177.5%	36.0%
+RETRIBUSI	11.1	11.1	0.0%	100.0%

Targets for Unit KAB.SIAK efficiency 100.00% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-DAU	101.3	101.3	0.0%	100.0%
-BRUTIN	320.0	320.0	0.0%	100.0%
-BMODAL	377.0	377.0	0.0%	100.0%
+PAJAK	12.3	12.3	0.0%	100.0%
+RETRIBUSI	15.4	15.4	0.0%	100.0%

Targets for Unit KT.PEKANBARU efficiency 100.00% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-DAU	161.8	161.8	0.0%	100.0%
-BRUTIN	252.3	252.3	0.0%	100.0%
-BMODAL	67.4	67.4	0.0%	100.0%
+PAJAK	30.1	30.1	0.0%	100.0%
+RETRIBUSI	22.7	22.7	0.0%	100.0%

Lampiran V. Tabel Efisiensi Tahun 2004

Table of efficiencies (radial)

11.63	KAB.PELALA	14.84	KAB.BENGKA	15.92	KAB.INHU
19.83	KAB.ROHIL	27.08	KAB.ROHUL	28.94	KT.DUMAI
34.32	KAB.KAMPAR	59.68	KAB.KUANTA	62.18	KAB.SIAK
81.02	KAB.INHIL	100.00	KT.PEKANBA		

Lampiran VI. Tabel Peer dengan Meminimumkan Input Tahun 2004

Table of peer units

Peers for Unit KAB.PELALAWAN efficiency 11.63% radial

KAB.PELALA		KT.PEKANBA
ACTUAL	LAMBDA	
109.0	-DAU	9.4
139.3	-BRUTIN	16.2
143.2	-BMODAL	3.9
1.1	+PAJAK	1.7
1.8	+RETRIBUSI	1.8

Peers for Unit KAB.BENGKALIS efficiency 14.84% radial

KAB.BENGKA		KT.PEKANBA
ACTUAL	LAMBDA	
206.7	-DAU	30.7
366.6	-BRUTIN	52.7
732.1	-BMODAL	12.8
5.6	+PAJAK	5.6
5.3	+RETRIBUSI	5.8

Peers for Unit KAB.INHU efficiency 15.92% radial

KAB.INHU		KT.PEKANBA
ACTUAL	LAMBDA	
162.3	-DAU	14.7
158.7	-BRUTIN	25.3
143.0	-BMODAL	6.1
1.5	+PAJAK	2.7
2.8	+RETRIBUSI	2.8

Peers for Unit KAB.ROHIL efficiency 19.83% radial

KAB.ROHIL		KT.PEKANBA
ACTUAL	LAMBDA	
91.8	-DAU	18.2
315.5	-BRUTIN	31.3
268.4	-BMODAL	7.6
3.3	+PAJAK	3.3
1.3	+RETRIBUSI	3.4

Peers for Unit KAB.ROHUL efficiency		27.08% radial
KAB.ROHUL	KT.PEKANBA	
ACTUAL	LAMBDA	0.075
104.1 -DAU		12.4
78.4 -BRUTIN		21.2
49.0 -BMODAL		5.2
1.1 +PAJAK		2.3
2.3 +RETRIBUSI		2.3
Peers for Unit KT.DUMAI efficiency		28.94% radial
KT.DUMAI	KT.PEKANBA	
ACTUAL	LAMBDA	0.143
97.8 -DAU		23.6
140.1 -BRUTIN		40.6
58.1 -BMODAL		9.8
3.3 +PAJAK		4.3
4.4 +RETRIBUSI		4.4
Peers for Unit KAB.KAMPAR efficiency		34.32% radial
KAB.KAMPAR	KT.PEKANBA	
ACTUAL	LAMBDA	0.174
185.1 -DAU		28.7
143.5 -BRUTIN		49.2
166.7 -BMODAL		11.9
3.8 +PAJAK		5.2
5.4 +RETRIBUSI		5.4
Peers for Unit KAB.KUANTANSING efficiency		59.68% radial
KAB.KUANTA	KT.PEKANBA	
ACTUAL	LAMBDA	0.102
125.4 -DAU		16.8
48.5 -BRUTIN		28.9
110.1 -BMODAL		7.0
1.4 +PAJAK		3.1
3.2 +RETRIBUSI		3.2
Peers for Unit KAB.SIAK efficiency		62.18% radial
KAB.SIAK	KT.PEKANBA	
ACTUAL	LAMBDA	0.374
99.1 -DAU		61.6
287.7 -BRUTIN		105.9
356.6 -BMODAL		25.7
11.3 +PAJAK		11.3
1.9 +RETRIBUSI		11.6
Peers for Unit KAB.INHIL efficiency		81.02% radial
KAB.INHIL	KT.PEKANBA	
ACTUAL	LAMBDA	0.455
203.8 -DAU		75.0
159.0 -BRUTIN		128.8
185.8 -BMODAL		31.2
4.1 +PAJAK		13.7
14.1 +RETRIBUSI		14.1

Peers for Unit KT.PEKANBARU efficiency 100.00% radial

KT.PEKANBA	LAMBDA	KT.PEKANBA
ACTUAL		1.000
164.7	-DAU	164.7
283.0	-BRUTIN	283.0
68.6	-BMODAL	68.6
30.1	+PAJAK	30.1
30.9	+RETRIBUSI	30.9

Lampiran VII. Tabel Target dengan Meminimumkan Input Tahun 2004

Table of target values

Targets for Unit KAB.PELALAWAN efficiency 11.63% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-DAU	109.0	9.4	91.3%	8.7%
-BRUTIN	139.3	16.2	88.4%	11.6%
-BMODAL	143.2	3.9	97.3%	2.7%
+PAJAK	1.1	1.7	58.2%	63.2%
+RETRIBUSI	1.8	1.8	0.0%	100.0%

Targets for Unit KAB.BENGKALIS efficiency 14.84% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-DAU	206.7	30.7	85.2%	14.8%
-BRUTIN	366.6	52.7	85.6%	14.4%
-BMODAL	732.1	12.8	98.3%	1.7%
+PAJAK	5.6	5.6	0.0%	100.0%
+RETRIBUSI	5.3	5.8	9.0%	91.7%

Targets for Unit KAB.INHU efficiency 15.92% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-DAU	162.3	14.7	90.9%	9.1%
-BRUTIN	158.7	25.3	84.1%	15.9%
-BMODAL	143.0	6.1	95.7%	4.3%
+PAJAK	1.5	2.7	78.1%	56.1%
+RETRIBUSI	2.8	2.8	0.0%	100.0%

Targets for Unit KAB.ROHIL efficiency 19.83% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-DAU	91.8	18.2	80.2%	19.8%
-BRUTIN	315.5	31.3	90.1%	9.9%
-BMODAL	268.4	7.6	97.2%	2.8%
+PAJAK	3.3	3.3	0.0%	100.0%
+RETRIBUSI	1.3	3.4	160.9%	38.3%

Targets for Unit KAB.ROHUL efficiency 27.08% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-DAU	104.1	12.4	88.1%	11.9%
-BRUTIN	78.4	21.2	72.9%	27.1%
-BMODAL	49.0	5.2	89.5%	10.5%
+PAJAK	1.1	2.3	96.6%	50.9%
+RETRIBUSI	2.3	2.3	0.0%	100.0%

Targets for Unit KT.DUMAI efficiency 28.94% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-DAU	97.8	23.6	75.9%	24.1%
-BRUTIN	140.1	40.6	71.1%	28.9%
-BMODAL	58.1	9.8	83.1%	16.9%
+PAJAK	3.3	4.3	29.6%	77.1%
+RETRIBUSI	4.4	4.4	0.0%	100.0%

Targets for Unit KAB.KAMPAR efficiency 34.32% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-DAU	185.1	28.7	84.5%	15.5%
-BRUTIN	143.5	49.2	65.7%	34.3%
-BMODAL	166.7	11.9	92.8%	7.2%
+PAJAK	3.8	5.2	36.2%	73.4%
+RETRIBUSI	5.4	5.4	0.0%	100.0%

Targets for Unit KAB.KUANTANSING efficiency 59.68% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-DAU	125.4	16.8	86.6%	13.4%
-BRUTIN	48.5	28.9	40.3%	59.7%
-BMODAL	110.1	7.0	93.6%	6.4%
+PAJAK	1.4	3.1	113.8%	46.8%
+RETRIBUSI	3.2	3.2	0.0%	100.0%

Targets for Unit KAB.SIAK efficiency 62.18% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-DAU	99.1	61.6	37.8%	62.2%
-BRUTIN	287.7	105.9	63.2%	36.8%
-BMODAL	356.6	25.7	92.8%	7.2%
+PAJAK	11.3	11.3	0.0%	100.0%
+RETRIBUSI	1.9	11.6	521.8%	16.1%

Targets for Unit KAB.INHIL efficiency 81.02% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-DAU	203.8	75.0	63.2%	36.8%
-BRUTIN	159.0	128.8	19.0%	81.0%
-BMODAL	185.8	31.2	83.2%	16.8%
+PAJAK	4.1	13.7	233.6%	30.0%
+RETRIBUSI	14.1	14.1	0.0%	100.0%

Targets for Unit KT.PEKANBARU efficiency 100.00% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-DAU	164.7	164.7	0.0%	100.0%
-BRUTIN	283.0	283.0	0.0%	100.0%
-BMODAL	68.6	68.6	0.0%	100.0%
+PAJAK	30.1	30.1	0.0%	100.0%
+RETRIBUSI	30.9	30.9	0.0%	100.0%

Lampiran VIII. Tabel Peer dengan Memaksimumkan Output Tahun 2003

Table of peer units

Peers for Unit KAB.INHU efficiency 21.85% radial

KAB.INHU	LAMBDA	KT.PEKANBA
ACTUAL		0.550
130.7	-DAU	89.0
138.7	-BRUTIN	138.7
135.4	-BMODAL	37.1
1.2	+PAJAK	16.6
2.7	+RETRIBUSI	12.5

Peers for Unit KAB.PELALAWAN efficiency 25.37% radial

KAB.PELALA	LAMBDA	KT.PEKANBA
ACTUAL		0.405
91.5	-DAU	65.6
102.3	-BRUTIN	102.3
168.5	-BMODAL	27.3
3.1	+PAJAK	12.2
1.0	+RETRIBUSI	9.2

Peers for Unit KAB.ROHUL efficiency 30.73% radial

KAB.ROHUL	LAMBDA	KT.PEKANBA
ACTUAL		0.325
93.9	-DAU	52.6
82.0	-BRUTIN	82.0
86.8	-BMODAL	21.9
1.1	+PAJAK	9.8
2.3	+RETRIBUSI	7.4

Peers for Unit KAB.KAMPAR efficiency 35.46% radial

KAB.KAMPAR	LAMBDA	KT.PEKANBA
ACTUAL		0.643
147.4	-DAU	104.0
162.1	-BRUTIN	162.1
322.9	-BMODAL	43.3
3.8	+PAJAK	19.4
5.2	+RETRIBUSI	14.6

Peers for Unit KT.DUMAI efficiency 37.30% radial

KT.DUMAI	LAMBDA	KT.PEKANBA
ACTUAL		0.543
99.1	-DAU	87.8
136.9	-BRUTIN	136.9
78.5	-BMODAL	36.6
3.2	+PAJAK	16.4
4.6	+RETRIBUSI	12.3

Peers for Unit KAB.BENGGALIS efficiency 38.06% radial

KAB.BENGGKA	LAMBDA	KT.PEKANBA
ACTUAL		0.919
148.6	-DAU	148.6
333.3	-BRUTIN	231.8
744.9	-BMODAL	61.9
10.5	+PAJAK	27.7
4.9	+RETRIBUSI	20.9

Peers for Unit KAB.ROHIL efficiency 38.58% radial

KAB.ROHIL	LAMBDA	KT.PEKANBA
ACTUAL		0.612
99.1 -DAU		99.1
255.0 -BRUTIN		154.4
430.3 -BMODAL		41.3
7.1 +PAJAK		18.5
0.9 +RETRIBUSI		13.9

Peers for Unit KAB.KUANTANSING efficiency 55.80% radial

KAB.KUANTA	LAMBDA	KT.PEKANBA
ACTUAL		0.215
126.5 -DAU		34.8
54.3 -BRUTIN		54.3
126.4 -BMODAL		14.5
1.2 +PAJAK		6.5
2.7 +RETRIBUSI		4.9

Peers for Unit KAB.INHIL efficiency 73.01% radial

KAB.INHIL	LAMBDA	KT.PEKANBA
ACTUAL		0.669
185.9 -DAU		108.3
168.9 -BRUTIN		168.9
173.0 -BMODAL		45.1
5.3 +PAJAK		20.2
11.1 +RETRIBUSI		15.2

Peers for Unit KAB.SIAK efficiency 100.00% radial

KAB.SIAK	LAMBDA	KAB.SIAK
ACTUAL		1.000
101.3 -DAU		101.3
320.0 -BRUTIN		320.0
377.0 -BMODAL		377.0
12.3 +PAJAK		12.3
15.4 +RETRIBUSI		15.4

Peers for Unit KT.PEKANBARU efficiency 100.00% radial

KT.PEKANBA	LAMBDA	KT.PEKANBA
ACTUAL		1.000
161.8 -DAU		161.8
252.3 -BRUTIN		252.3
67.4 -BMODAL		67.4
30.1 +PAJAK		30.1
22.7 +RETRIBUSI		22.7

Lampiran IX. Tabel Target dengan Memaksimumkan Output Tahun 2003

Table of target values

Targets for Unit KAB.INHU efficiency		21.85% radial		
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-DAU	130.7	89.0	31.9%	68.1%
-BRUTIN	138.7	138.7	0.0%	100.0%
-BMODAL	135.4	37.1	72.6%	27.4%
+PAJAK	1.2	16.6	1258.7%	7.4%
+RETRIBUSI	2.7	12.5	357.8%	21.8%

Targets for Unit KAB.PELALAWAN efficiency 25.37% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-DAU	91.5	65.6	28.3%	71.7%
-BRUTIN	102.3	102.3	0.0%	100.0%
-BMODAL	168.5	27.3	83.8%	16.2%
+PAJAK	3.1	12.2	294.2%	25.4%
+RETRIBUSI	1.0	9.2	830.6%	10.7%

Targets for Unit KAB.ROHUL efficiency 30.73% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-DAU	93.9	52.6	44.0%	56.0%
-BRUTIN	82.0	82.0	0.0%	100.0%
-BMODAL	86.8	21.9	74.8%	25.2%
+PAJAK	1.1	9.8	824.5%	10.8%
+RETRIBUSI	2.3	7.4	225.5%	30.7%

Targets for Unit KAB.KAMPAR efficiency 35.46% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-DAU	147.4	104.0	29.5%	70.5%
-BRUTIN	162.1	162.1	0.0%	100.0%
-BMODAL	322.9	43.3	86.6%	13.4%
+PAJAK	3.8	19.4	403.3%	19.9%
+RETRIBUSI	5.2	14.6	182.0%	35.5%

Targets for Unit KT.DUMAI efficiency 37.30% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-DAU	99.1	87.8	11.5%	88.5%
-BRUTIN	136.9	136.9	0.0%	100.0%
-BMODAL	78.5	36.6	53.4%	46.6%
+PAJAK	3.2	16.4	404.8%	19.8%
+RETRIBUSI	4.6	12.3	168.1%	37.3%

Targets for Unit KAB.BENGLALIS efficiency 38.06% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-DAU	148.6	148.6	0.0%	100.0%
-BRUTIN	333.3	231.8	30.5%	69.5%
-BMODAL	744.9	61.9	91.7%	8.3%
+PAJAK	10.5	27.7	162.8%	38.1%
+RETRIBUSI	4.9	20.9	326.1%	23.5%

Targets for Unit KAB.ROHIL efficiency 38.58% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-DAU	99.1	99.1	0.0%	100.0%
-BRUTIN	255.0	154.4	39.4%	60.6%
-BMODAL	430.3	41.3	90.4%	9.6%
+PAJAK	7.1	18.5	159.2%	38.6%
+RETRIBUSI	0.9	13.9	1518.0%	6.2%

Targets for Unit KAB.KUANTANSING efficiency 55.80% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-DAU	126.5	34.8	72.5%	27.5%
-BRUTIN	54.3	54.3	0.0%	100.0%
-BMODAL	126.4	14.5	88.5%	11.5%
+PAJAK	1.2	6.5	445.3%	18.3%
+RETRIBUSI	2.7	4.9	79.2%	55.8%

Targets for Unit KAB.INHIL efficiency 73.01% radial

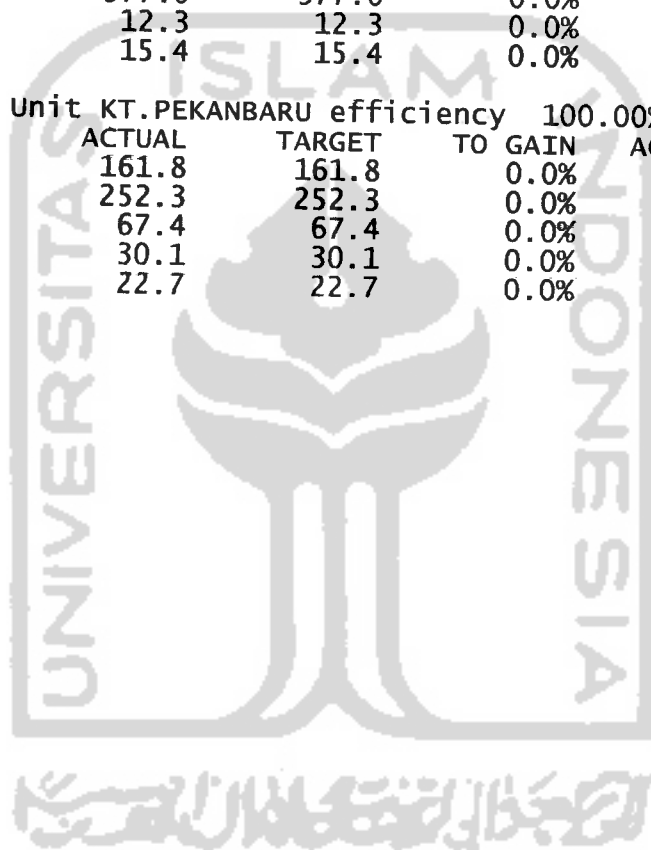
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-DAU	185.9	108.3	41.7%	58.3%
-BRUTIN	168.9	168.9	0.0%	100.0%
-BMODAL	173.0	45.1	73.9%	26.1%
+PAJAK	5.3	20.2	280.1%	26.3%
+RETRIBUSI	11.1	15.2	37.0%	73.0%

Targets for Unit KAB.SIAK efficiency 100.00% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-DAU	101.3	101.3	0.0%	100.0%
-BRUTIN	320.0	320.0	0.0%	100.0%
-BMODAL	377.0	377.0	0.0%	100.0%
+PAJAK	12.3	12.3	0.0%	100.0%
+RETRIBUSI	15.4	15.4	0.0%	100.0%

Targets for Unit KT.PEKANBARU efficiency 100.00% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-DAU	161.8	161.8	0.0%	100.0%
-BRUTIN	252.3	252.3	0.0%	100.0%
-BMODAL	67.4	67.4	0.0%	100.0%
+PAJAK	30.1	30.1	0.0%	100.0%
+RETRIBUSI	22.7	22.7	0.0%	100.0%



Lampiran X. Tabel Peer dengan Memaximumkan Output Tahun 2004

Table of peer units

Peers for Unit KAB.PELALAWAN efficiency 11.63% radial

KAB.PELALA	LAMBDA	KT.PEKANBA
ACTUAL		0.492
109.0 -DAU		81.1
139.3 -BRUTIN		139.3
143.2 -BMODAL		33.8
1.1 +PAJAK		14.8
1.8 +RETRIBUSI		15.2

Peers for Unit KAB.BENGKALIS efficiency 14.84% radial

KAB.BENGA	LAMBDA	KT.PEKANBA
ACTUAL		1.255
206.7 -DAU		206.7
366.6 -BRUTIN		355.1
732.1 -BMODAL		86.1
5.6 +PAJAK		37.8
5.3 +RETRIBUSI		38.8

Peers for Unit KAB.INHU efficiency 15.92% radial

KAB.INHU	LAMBDA	KT.PEKANBA
ACTUAL		0.561
162.3 -DAU		92.4
158.7 -BRUTIN		158.7
143.0 -BMODAL		38.5
1.5 +PAJAK		16.9
2.8 +RETRIBUSI		17.3

Peers for Unit KAB.ROHIL efficiency 19.83% radial

KAB.ROHIL	LAMBDA	KT.PEKANBA
ACTUAL		0.557
91.8 -DAU		91.8
315.5 -BRUTIN		157.8
268.4 -BMODAL		38.3
3.3 +PAJAK		16.8
1.3 +RETRIBUSI		17.2

Peers for Unit KAB.ROHUL efficiency 27.08% radial

KAB.ROHUL	LAMBDA	KT.PEKANBA
ACTUAL		0.277
104.1 -DAU		45.7
78.4 -BRUTIN		78.4
49.0 -BMODAL		19.0
1.1 +PAJAK		8.3
2.3 +RETRIBUSI		8.6

Peers for Unit KT.DUMAI efficiency 28.94% radial

KT.DUMAI	LAMBDA	KT.PEKANBA
ACTUAL		0.495
97.8 -DAU		81.6
140.1 -BRUTIN		140.1
58.1 -BMODAL		34.0
3.3 +PAJAK		14.9
4.4 +RETRIBUSI		15.3

Peers for Unit KAB.KAMPAR efficiency 34.32% radial

KAB.KAMPAR	LAMBDA	KT.PEKANBA
ACTUAL		0.507
185.1 -DAU		83.5
143.5 -BRUTIN		143.5
166.7 -BMODAL		34.8
3.8 +PAJAK		15.3
5.4 +RETRIBUSI		15.7

Peers for Unit KAB.KUANTANSING efficiency 59.68% radial

KAB.KUANTA	LAMBDA	KT.PEKANBA
ACTUAL		0.171
125.4 -DAU		28.2
48.5 -BRUTIN		48.5
110.1 -BMODAL		11.8
1.4 +PAJAK		5.2
3.2 +RETRIBUSI		5.3

Peers for Unit KAB.SIAK efficiency 62.18% radial

KAB.SIAK	LAMBDA	KT.PEKANBA
ACTUAL		0.602
99.1 -DAU		99.1
287.7 -BRUTIN		170.3
356.6 -BMODAL		41.3
11.3 +PAJAK		18.1
1.9 +RETRIBUSI		18.6

Peers for Unit KAB.INHIL efficiency 81.02% radial

KAB.INHIL	LAMBDA	KT.PEKANBA
ACTUAL		0.562
203.8 -DAU		92.5
159.0 -BRUTIN		159.0
185.8 -BMODAL		38.6
4.1 +PAJAK		16.9
14.1 +RETRIBUSI		17.4

Peers for Unit KT.PEKANBARU efficiency 100.00% radial

KT.PEKANBA	LAMBDA	KT.PEKANBA
ACTUAL		1.000
164.7 -DAU		164.7
283.0 -BRUTIN		283.0
68.6 -BMODAL		68.6
30.1 +PAJAK		30.1
30.9 +RETRIBUSI		30.9

Lampiran XI. Tabel Target dengan Memaksimumkan Output Tahun 2004

Table of target values

Targets for Unit KAB.PELALAWAN efficiency 11.63% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-DAU	109.0	81.1	25.6%	74.4%
-BRUTIN	139.3	139.3	0.0%	100.0%
-BMODAL	143.2	33.8	76.4%	23.6%
+PAJAK	1.1	14.8	1260.8%	7.3%
+RETRIBUSI	1.8	15.2	760.0%	11.6%

Targets for Unit KAB.BENGKALIS efficiency 14.84% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-DAU	206.7	206.7	0.0%	100.0%
-BRUTIN	366.6	355.1	3.1%	96.9%
-BMODAL	732.1	86.1	88.2%	11.8%
+PAJAK	5.6	37.8	573.8%	14.8%
+RETRIBUSI	5.3	38.8	634.7%	13.6%

Targets for Unit KAB.INHU efficiency 15.92% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-DAU	162.3	92.4	43.1%	56.9%
-BRUTIN	158.7	158.7	0.0%	100.0%
-BMODAL	143.0	38.5	73.1%	26.9%
+PAJAK	1.5	16.9	1018.6%	8.9%
+RETRIBUSI	2.8	17.3	528.0%	15.9%

Targets for Unit KAB.ROHIL efficiency 19.83% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-DAU	91.8	91.8	0.0%	100.0%
-BRUTIN	315.5	157.8	50.0%	50.0%
-BMODAL	268.4	38.3	85.7%	14.3%
+PAJAK	3.3	16.8	404.4%	19.8%
+RETRIBUSI	1.3	17.2	1215.8%	7.6%

Targets for Unit KAB.ROHUL efficiency 27.08% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-DAU	104.1	45.7	56.2%	43.8%
-BRUTIN	78.4	78.4	0.0%	100.0%
-BMODAL	49.0	19.0	61.2%	38.8%
+PAJAK	1.1	8.3	626.0%	13.8%
+RETRIBUSI	2.3	8.6	269.3%	27.1%

Targets for Unit KT.DUMAI efficiency 28.94% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-DAU	97.8	81.6	16.6%	83.4%
-BRUTIN	140.1	140.1	0.0%	100.0%
-BMODAL	58.1	34.0	41.5%	58.5%
+PAJAK	3.3	14.9	348.0%	22.3%
+RETRIBUSI	4.4	15.3	245.6%	28.9%

Targets for Unit KAB.KAMPAR efficiency 34.32% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-DAU	185.1	83.5	54.9%	45.1%
-BRUTIN	143.5	143.5	0.0%	100.0%
-BMODAL	166.7	34.8	79.1%	20.9%
+PAJAK	3.8	15.3	296.8%	25.2%
+RETRIBUSI	5.4	15.7	191.4%	34.3%

Targets for Unit KAB.KUANTANSING efficiency 59.68% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-DAU	125.4	28.2	77.5%	22.5%
-BRUTIN	48.5	48.5	0.0%	100.0%
-BMODAL	110.1	11.8	89.3%	10.7%
+PAJAK	1.4	5.2	258.3%	27.9%
+RETRIBUSI	3.2	5.3	67.6%	59.7%

Targets for Unit KAB.SIAK efficiency 62.18% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-DAU	99.1	99.1	0.0%	100.0%
-BRUTIN	287.7	170.3	40.8%	59.2%
-BMODAL	356.6	41.3	88.4%	11.6%
+PAJAK	11.3	18.1	60.8%	62.2%
+RETRIBUSI	1.9	18.6	900.0%	10.0%

Targets for Unit KAB.INHIL efficiency 81.02% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-DAU	203.8	92.5	54.6%	45.4%
-BRUTIN	159.0	159.0	0.0%	100.0%
-BMODAL	185.8	38.6	79.3%	20.7%
+PAJAK	4.1	16.9	311.7%	24.3%
+RETRIBUSI	14.1	17.4	23.4%	81.0%

Targets for Unit KT.PEKANBARU efficiency 100.00% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-DAU	164.7	164.7	0.0%	100.0%
-BRUTIN	283.0	283.0	0.0%	100.0%
-BMODAL	68.6	68.6	0.0%	100.0%
+PAJAK	30.1	30.1	0.0%	100.0%
+RETRIBUSI	30.9	30.9	0.0%	100.0%

